



Kajian Sejarah Sosial
Masyarakat Nelayan di Pesisir

Waingapu

Kabupaten Sumba Timur
Kecamatan Nusa Tenggara Timur

Direktorat
Budayaan

8



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA BALI
TAHUN 2014

Nuryahman
Ketut Sudharma Putra
Dwi Bambang Santosa

**KAJIAN SEJARAH SOSIAL
MASYARAKAT NELAYAN DI PESISIR WAINGAPU
KABUPATEN SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**KAJIAN SEJARAH SOSIAL
MASYARAKAT NELAYAN DI PESISIR WAINGAPU
KABUPATEN SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Nuryahman
I Ketut Sudharma Putra
Dwi Bambang Santosa

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA BALI
TAHUN 2014**

**KAJIAN SEJARAH SOSIAL MASYARAKAT NELAYAN DI PESISIR WAINGAPU
KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**
Copyright©Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, 2014

Diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali
Bekerja sama dengan
Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2014
Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55292
Tlp. (0274) 7019945; Fax. (0274) 620606
e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id
facebook: Penerbit Ombak Dua
website: www.penerbitombak.com

PO.550.11.'14

Penulis: Nuryahman, dkk.
Penyunting: Aditya Pratama
Tata letak & sampul: Dian Qamajaya

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
**KAJIAN SEJARAH SOSIAL MASYARAKAT NELAYAN DI PESISIR WAINGAPU
KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**
Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014
xiv + 120 hlm.; 14,5 x 21 cm
ISBN: 978-602-258-241-0

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ~ v

DAFTAR TABEL ~ vii

DAFTAR GAMBAR ~ viii

KATA PENGANTAR ~ ix

PENGANTAR PENULIS ~ xii

BAB I PENDAHULUAN ~ 1

- A. Latar Belakang ~ 1
- B. Tentang Nelayan dan Perkehidupannya ~ 4
- C. Landasan Teori ~ 7
 - 1. Teori Integrasi ~ 7
 - 2. Teori Perubahan Sosial ~ 8
 - 3. Teori Modernisasi ~ 9

BAB II SUMBA TIMUR: WILAYAH DAN MASYARAKATNYA ~ 11

- A. Kabupaten Sumba Timur ~ 11
 - 1. Kondisi Geografi Kabupaten Sumba Timur ~ 11
 - 2. Sejarah Kabupaten Sumba Timur ~ 12
 - 3. Religi Masyarakat Sumba ~ 17
 - 4. Karya Seni dan Sastra Suku Sumba ~ 20
- B. Kelurahan Kamalapati ~ 22
 - 1. Kondisi Penduduk ~ 23
 - 2. Kondisi Kesehatan Penduduk ~ 28

**BAB III. KEBERADAAN MASYARAKAT NELAYAN DI PESISIR
WAINGAPU, KABUPATEN SUMBA TIMUR, PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR ~ 31**

- A. Awal Mula Keberadaan Masyarakat Nelayan Di Pesisir Waingapu, Sumba Timur ~ 31
- B. Kondisi Alam dan Lingkungan Pesisir Waingapu, Sumba Timur ~ 34
- C. Aktivitas Masyarakat Di Pesisir Waingapu, Sumba Timur ~ 36
- D. Alat Tangkap Yang Digunakan Masyarakat Nelayan Di Pesisir Waingapu ~ 39
- E. Aktivitas Masyarakat Nelayan Di Pesisir Waingapu ~ 44
- F. Sistem Distribusi Hasil Tangkapan Ikan ~ 49
- G. Pantangan Dan Kepercayaan Masyarakat Nelayan Di Pesisir Waingapu ~ 51
- H. Potensi Dan Kendala Yang Dihadapi Kelompok Nelayan ~ 53

**BAB IV PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT NELAYAN DI PESISIR
WAINGAPU SUMBA TIMUR ~ 64**

- A. Menuju Masyarakat Nelayan Modern ~ 64
- B. Perubahan Pola Usaha ~ 70
- C. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tangkapan ~ 77
- D. Peran Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan ~ 81
 - 1. Peningkatan Partisipasi ~ 81
 - 2. Bantuan Modal dan Program Kesejahteraan ~ 87
 - 3. Usaha Pemberdayaan yang Dilakukan ~ 92

BAB V PENUTUP ~ 104

DAFTAR PUSTAKA ~ 107

LAMPIRAN FOTO ~ 112

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin ~ 23

Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Usia ~ 24

Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Agama ~ 25

Tabel 4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian ~ 26

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1. Kondisi Lingkungan di Pesisir Waingapu ~ 35
- Gambar 3.2. Perahu Sebagai Sarana Menangkap Ikan ~ 42
- Gambar 3.3. Alat Menangkap Ikan Berupa Jaring ~ 43
- Gambar 3.4. Aktivitas Nelayan di Pesisir Waingapu ~ 47
- Gambar 4.1. Pukat Cincin Salah Satu Alat Tangkap yang Digunakan Oleh Nelayan di Pesisir Waingapu ~ 66
- Gambar 4.2. Beberapa Armada Perahu yang Dimiliki Oleh Para Nelayan di Pesisir Waingapu Sedang Bersandar di Pelabuhan Waingapu ~ 67
- Gambar 4.3. Pedagang Ikan Keliling di Kota Waingapu Mempunyai Peran Penting Dalam Pemasaran Hasil Tangkapan Nelayan Waingapu ~ 80

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan *Ida Sanghyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali telah selesai melaksanakan kajian di bidang kesejarahan dan telah dapat diselesaikan sesuai rencana dan waktu yang telah ditentukan. Kegiatan ini merupakan program rutin dari Aspek Kesejarahan di Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali Tahun Anggaran 2014. Salah satunya adalah kajian kesejarahan tentang “Kajian Sejarah Sosial Masyarakat Nelayan Di Pesisir Waingapu Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur”.

Sejarah kejayaan Nusantara tidak bisa dilepaskan dari sejarah bahari, karena sejak abad ke-5 jauh sebelum kedatangan orang-orang Eropa di perairan Nusantara, pelaut-pelaut negeri ini telah menguasai laut internasional dan tampil sebagai penjelajah samudra. Kronik Cina serta risalah-risalah musafir Arab dan Persia menorehkan catatan agung tentang tradisi besar kelautan nenek moyang bangsa Indonesia. Bahkan sejarah kejayaan Sriwijaya dan Majapahit dalam upaya menyatukan nusantara, tidak lepas dari kekuatan pelaut dan armada bahari yang dimiliki saat itu. Membicarakan tentang bahari, pikiran kita tidak lepas dari sosok nelayan, berbeda konteks, nelayan dulu adalah sosok terpandang, memiliki identitas sebagai mereka yang tangguh, dan dihormati

karena keberhasilannya, namun untuk konteks saat ini, nelayan identik dengan sekelompok masyarakat yang terabaikan dan kurang sejahtera, tinggal di wilayah kumuh pinggiran pantai, yang sulit untuk bisa naik kelas menjadi masyarakat sejahtera.

Masyarakat pesisir dan nelayan merupakan komponen utama masyarakat maritim Indonesia. Hal ini didukung kondisi geografis Indonesia yang memiliki wilayah pesisir lebih luas dibandingkan luas wilayah daratan. Luasnya wilayah pesisir memungkinkan masyarakat setempat mengembangkan potensi daerah pesisir dan laut sebagai sumber penghidupan. Sebagai masyarakat nelayan, mereka sepenuhnya menggantungkan hidup sebagai pengelola hasil kekayaan laut. Dengan demikian, perhatian terhadap pemberdayaan nelayan dan perekonomian masyarakat pesisir di Indonesia sangat penting. Bagaimanapun juga, kejayaan kehidupan masyarakat maritim berpengaruh besar terhadap kejayaan ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya. Tetapi dalam kenyataannya kehidupan maritim khususnya masyarakat nelayan di Indonesia identik dengan keterbelakangan dan kurang sejahtera.

Dengan mengkaji perkembangan dan kehidupan nelayan di Indonesia, dalam hal ini masyarakat nelayan di pesisir Waingapu Sumba Timur kiranya dapat dilihat bagaimana keadaan masyarakat nelayan sebenarnya. Dengan demikian bisa didapatkan beberapa hal yang bisa dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, baik itu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun lembaga-lembaga yang peduli dan perhatian terhadap masyarakat pesisir terutama nelayan maupun berbagai aktivitas bahari di Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikan kajian ini. Semoga hasil kajian ini dapat

memberikan manfaat bagi semua pihak dan para pemangku kepentingan. Namun demikian hasil kajian ini masih banyak kekurangannya dengan apa yang diharapkan dari kesempurnaan, kami selalu mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi lebih sempurnanya buku ini.

Denpasar, 2014

Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali



Drs. I Made Purna, M.Si

NIP. 19591231 198710 1 001

PENGANTAR PENULIS

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, karena berkat karunia dan rahmat-Nya, maka penulisan *Kajian Sejarah Sosial Masyarakat Nelayan Di Pesisir Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai tindak lanjut penulisan laporan penelitian, dicetak dalam bentuk buku. Hasil akhirnya, terbitlah buku kecil ini, sebagai kegiatan rutin Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali Tahun Anggaran 2014.

Pesisir Waingapu di Kabupaten Sumba Timur, memiliki potensi yang dapat dikembangkan secara lebih optimal. Adapun potensi tersebut, di antaranya potensi alam, berupa keindahan panorama dan kekayaan lautnya. Keindahan panorama dapat terlihat melalui pasir putihnya, yang terdapat di sepanjang pesisir Waingapu. Sedangkan kekayaan laut yang dimiliki, yaitu sepanjang empat mil dari pantai, terdiri atas hasil ikan maupun non ikan. Kekayaan laut berupa ikan, yang sementara ini telah dipanen antara lain ikan tuna, blue marliyn, cumi-cumi, teripang, dan lain-lain.

Selain potensi, sudah tentu terdapat kendala yang dihadapi masyarakat nelayan yang tinggal di pesisir Waingapu. Kendala utama yang dihadapi berupa terbatasnya kepemilikan modal, serta penggunaan sarana dan prasarana yang masih sederhana. Kendala yang lainnya adalah keterbatasan untuk mendapatkan bahan bakar

minyak, juga masih dirasakan para nelayan. Mengingat belum adanya kios-kios maupun warung-warung yang menyediakan bahan bakar minyak (BBM). Meski demikian, masyarakat pesisir Waingapu telah memanfaatkan potensi kekayaan lautnya, seperti membuat garam, melakukan penangkapan ikan, dan lain-lain.

Mengingat adanya berbagai potensi dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat nelayan, pemerintah dan masyarakat telah melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir Waingapu, khususnya nelayan. Pemerintah telah memberikan bantuan berupa dana (uang), yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang sarana dan prasarana. Selain itu, juga telah membantu dan mendorong masyarakat untuk membentuk kelompok-kelompok nelayan. Kelompok nelayan tenggiri dan kelompok nelayan maju bersama yang ada di Kelurahan Kamalapati, kecamatan Kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur, digunakan sebagai sampel penelitian. Kedua kelompok nelayan ini dipakai sebagai sampel penelitian, berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain: 1). Masyarakat yang tinggal di pesisir Kelurahan Kamalapati, telah melakukan usaha penangkapan ikan sejak zaman nenek moyang; 2). Pengurus dan anggota kelompoknya telah menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik, sebagai anggota kelompok, sehingga sampai saat ini masih tetap bertahan. Meskipun demikian, masyarakat nelayan yang tinggal di pesisir Waingapu pada umumnya dan di Kelurahan Kamalapati pada khususnya, masih membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Dengan demikian, nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat nelayan, khususnya yang berada di pesisir Waingapu.

Kami menyadari bahwa, buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan sekali kritik dan saran pembaca, sehingga buku ini menjadi lebih sempurna. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berperan dalam penerbitan ini. Semoga terbitnya buku ini, bermanfaat bagi banyak pihak.

Denpasar, Oktober 2014

Tim Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang, banyak mendapat pengaruh dari negara-negara luar, baik dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persaingan, dan menuntut manusia untuk terus berusaha dalam mempertahankan hidupnya. Perlu disadari bahwa kehidupan manusia sekarang jauh berbeda dengan zaman dahulu. Salah satu contoh misalnya, zaman dahulu manusia melakukan aktivitas, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan kegiatan yang dilakukan manusia pada zaman sekarang, selain untuk memenuhi kebutuhan, juga ditukar atau dijual guna memenuhi kebutuhan benda lainnya.

Sehubungan dengan uraian di atas, Koentjaraningrat (1998:2), telah mengklasifikasi mata pencaharian masyarakat tradisional menjadi beberapa kelompok, yakni: (1) berburu dan meramu, (2) menangkap ikan (nelayan), dan (3) bercocok tanam. Selain berburu dan meramu, menangkap ikan juga merupakan mata pencaharian hidup masyarakat, dan telah ada sejak awal keberadaan manusia di bumi. Manusia purba yang kebetulan hidup dekat rawa-rawa, sungai, danau, dan laut, telah memanfaatkan sumber alam

laut, guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika manusia mulai mengenal kepandaian bercocok tanam, mencari ikan seringkali dijadikan mata pencaharian tambahan. Akan tetapi sebaliknya di samping menangkap ikan, masyarakat nelayan yang menggantungkan hidupnya dari menangkap hasil laut, juga mengerjakan kebun atau ladang.

Kehidupan sebagai nelayan, yang dilakukan oleh masyarakat pesisir di Indonesia, didukung oleh potensi wilayah laut yang cukup luas. Indonesia sebagai negara kepulauan, dengan jumlah pulau sekitar 17.508 buah, dan memiliki panjang pantai terpanjang di dunia, yakni sekitar 81.000 km. Sebagai wilayah tropis perairan laut pesisir Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang cukup potensial seperti terumbu karang, ikan, dan beraneka jenis moluska. Semua sumber daya alam laut tersebut merupakan salah satu modal dasar yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional (Kusuma, 2005:1).

Keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap kehidupan masyarakat pesisir semakin meningkat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut (Kusuma, 2005:vi). Keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, juga diharapkan dapat mendorong semangat pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir, melalui pengembangan potensi yang mereka miliki.

Selain perhatian pemerintah, kehidupan masyarakat pesisir juga telah banyak dikaji oleh ilmuwan sosial, termasuk para sejarawan. Kartodirdjo (1993:157) menjelaskan kategori sejarah terdiri atas:

(1) sejarah sosial, (2) sejarah politik, (3) sejarah mentalitas, (4) sejarah intelektual, (5) sejarah agraris, (6) sejarah kebudayaan I, (7) sejarah kebudayaan II. Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa sejarah sosial mencakup perkembangan golongan-golongan sosial serta gaya hidupnya, misalnya, sejarah istana sebagai masyarakat yang mempunyai subkultur tersendiri, golongan bangsawan, kaum borjuis, elite birokratik, golongan militer, atau kaum aristokrasi pada umumnya. Kecuali itu termasuk pula dalam cakupan sejarah sosial pelbagai elite modern, seperti kaum intelegensia, meritokrasi, pengusaha, kaum profesional, yang kesemuanya tergolong apa yang disebut *elite strategis*. Berdasarkan pengkategorian di atas, kajian masyarakat pesisir (nelayan), dimasukkan ke dalam sejarah sosial.

Berdasarkan uraian di atas, mengingat luasnya wilayah pesisir Indonesia, dan memiliki sumber alam laut yang sangat banyak, maka pada 2014, Balai Pelestarian Nilai Budaya Badung Bali, NTB, NTT, melakukan kajian mengenai kehidupan dan perkembangan masyarakat nelayan, dengan judul “Kajian Sejarah Sosial Masyarakat Nelayan Di Pesisir Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Kajian ini dipandang perlu mengingat masyarakat di wilayah Indonesia Timur memiliki kawasan pesisir yang cukup luas, serta kaya akan sumber daya alam laut, salah satunya berupa ikan laut. Wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai perikanan laut menonjol, yakni daerah-daerah pantai di pulau Flores, Lembata, Adenara, Pantar, Alor, Sumba, Rote, Sabu, dan sebagian Timor terutama sekitar teluk Kupang (Widiyatmika, dkk, 2007:45). Kajian tersebut akhirnya diterbitkan sebagai buku yang sedang Anda genggam kini.

Kehidupan masyarakat nelayan khususnya yang berada di pesisir Waingapu, sebagian besar masih menggunakan peralatan yang sederhana. Peralatan yang mereka gunakan untuk

penangkapan ikan, sangat berpengaruh terhadap perolehan hasil tangkapan. Hasil tangkapan yang diperoleh, sementara ini hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, maka secara umum, kehidupan masyarakat nelayan masih tergolong miskin. Untuk itu, perlu adanya perhatian yang lebih serius, serta dukungan dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat (swasta), dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup para nelayan.

Dalam buku ini kami ingin berbagi informasi terkait dengan kehidupan nelayan di Waingapu, yakni dengan melalui pembahasan mengenai:

Eksistensi dan kehidupan masyarakat nelayan di pesisir Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dan Peran pemerintah dan masyarakat, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di pesisir Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

B. Tentang Nelayan dan Perikehidupannya

Masyarakat Nelayan, dan Wilayah Pesisir

Secara konseptual, masyarakat menurut Soekanto (1994:26), adalah "manusia yang hidup bersama bercampur dalam waktu yang cukup lama, dan menyadari bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Sistem hidup bersama yang dimiliki oleh masyarakat, dapat menimbulkan kebudayaan, serta setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya."

Lebih lanjut, Soetomo (2011) mengungkapkan pengertian masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpolakan terorganisasi. Manusia baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat mempunyai kebutuhan. Dalam kebutuhan masyarakat, kebutuhan dapat bersifat individual atau kelompok.

Kamus Umum Bahasa Indonesia menerangkan arti kata *nelayan* adalah 'penangkap ikan di laut' (Poerwadarminta, 1976:674). Sehubungan dengan pengertian tersebut, Herwanto (1998/1999), menjelaskan kata *penangkapan* adalah 'usaha manusia untuk mengeksploitasi suatu perairan dengan cara memburu dan menangkap (*fishing*).' Kegiatan penangkapan ini pada umumnya lebih besar dilakukan di perairan laut dibandingkan dengan di perairan darat. Oleh karena itu penangkapan yang dilakukan di dalam hal ini adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan laut (Pasal 1 Ayat 10 dan 11 UU Nomor 31 Tahun 2004).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat nelayan adalah 'sekelompok masyarakat yang umumnya tinggal di wilayah pesisir dan melakukan pekerjaan menangkap ikan.' Dalam hal ini adalah masyarakat nelayan penangkap ikan (*seaman*) yang tinggal di pesisir Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Megenai lokasi kehidupan nelayan, yaitu wilayah pesisir, didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 sebagai 'suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antar pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat' (BPSPL, 2011).

Secara definitif wilayah pesisir adalah 'daerah peralihan antara darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.' Lebih spesifik, wilayah pesisir adalah *daerah pertemuan antara darat dan laut*; ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan kearah laut mencakup bagian laut

yang masih dipengaruhi oleh proses alam yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Batasan tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat garis batas nyata wilayah pesisir. Batas tersebut hanyalah garis khayal yang letaknya ditentukan oleh situasi dan kondisi setempat.

Sehubungan dengan uraian di atas, bila dikaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu mengenai kehidupan masyarakat nelayan di pesisir Waingapu, nantinya akan banyak mengungkap dan menjelaskan mengenai keadaan dan situasi yang terjadi di daerah peralihan antara darat dan laut di wilayah pesisir Waingapu.

Dengan demikian dapatlah kita simpulkan bahwa masyarakat nelayan di pesisir Waingapu adalah sekelompok masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, dengan mata pencaharian pokok sebagai nelayan (menangkap ikan). Mata pencaharian sebagai nelayan bagi masyarakat di pesisir Waingapu, telah dilakukan masyarakat sejak zaman dahulu, dan sampai sekarang masih dijalankannya.

Sehubungan dengan uraian di atas, untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya masyarakat nelayan di pesisir Waingapu, perlu dilakukan pengelolaan yang lebih matang. Terkait dengan pengelolaan, tercakup di dalamnya mengenai: perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir. Semua itu dapat diwujudkan melalui kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maupun antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Dengan demikian akan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat nelayan, khususnya yang ada di pesisir Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

C. Landasan Teori

Guna memahami kajian berbagai fenomena sejarah dan sosial yang terjadi pada masyarakat nelayan di pesisir Waingapu, maka diperlukan pembacaan yang detail, salah satunya dengan penggunaan teori-teori mutakhir. Adapun beberapa teori yang kami gunakan dalam buku ini antara lain: teori integrasi, teori perubahan sosial, dan teori modernisasi.

1. Teori Integrasi

Teori integrasi menganggap bahwa masyarakat pada hakikatnya akan terintegrasi atas dasar kesepakatan para anggotanya. Nasikun menyebut *integration approach*, yang dimaksud kata kesepakatan itu di dasari atas nilai-nilai kemasyarakatan, sebagai suatu *general agreement* untuk mengatasi perbedaan-perbedaan, pendapat-pendapat dalam kepentingan anggotanya. Hal yang senada juga diungkap oleh Ogburn dari Mainloff yang mengatakan teori integrasi merupakan proses individu atau kelompok yang berbeda-beda menjadi keadaan yang sama pada suatu saat (Suarsana, 2012:130).

Teori Integrasi ini relevan digunakan untuk membahas masyarakat nelayan di pesisir Waingapu. Melalui teori integrasi, nantinya dapat digunakan untuk menganalisis perbedaan-perbedaan pendapat, persepsi, pandangan maupun perbedaan keyakinan dalam kehidupan masyarakat nelayan di pesisir Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat nelayan di pesisir Waingapu, selama ini telah terintegrasi dalam kurun waktu yang cukup lama. Padahal, bila ditinjau dari asal-usul masyarakatnya, mereka berasal dari berbagai daerah, dan kemudian tinggal menetap di pesisir Waingapu.

2. Teori Perubahan Sosial

Selain teori integrasi, dalam penelitian ini juga menggunakan teori perubahan sosial. Paradigma yang sangat besar dan luas pengaruhnya dalam studi perubahan sosial, ialah teori-teori sistemik, fungsionalis, dan empiris-positivis pada umumnya. Teori perubahan sosial telah banyak diuraikan oleh ilmuan sosial, yakni: Radcliff-Brown dan Malinowski. Pendapat kedua tokoh ini, mengenai masalah perubahan sosial, dapat disimak pada teori T. Parsons dan N. Smelzer. Dalam hal ini, masyarakat dikonsepsikan sebagai sistem yang mempunyai fungsi adaptasi (*economy*), integrasi (*society*), mempertahankan diri (*culture*), dan memberi orientasi tujuan (*polity*). Meskipun teori sistem mencakup ide masyarakat *ekuilibrium*, namun dengan adanya proses adaptasi dan interaksi untuk menghadapi pengaruh eksogen dan endogen, maka tetap ada dinamika sosial. Kerangka teoretis tersebut juga menonjol dalam teori perubahan sosial sebagai bentuk perkembangan atau pembangunan. Oleh sebab itulah studi perubahan sosial lebih banyak dilakukan sebagai studi pembangunan (*development studies*). Dalam hal ini teori-teori pembangunan yang disusun oleh sarjana-sarjana ilmu sosial cukup banyak menarik perhatian (Kartodirdjo, 1993:163).

Teori perubahan sosial relevan digunakan dalam penelitian ini, mengingat kajian mengenai masyarakat nelayan, khususnya nelayan tradisional, juga merupakan kajian studi pembangunan (*development studies*). Di samping itu melalui teori perubahan sosial, khususnya dipandang dari paradigma teori evolusionisme, menggambarkan perkembangan masyarakat yang bergerak secara unilinear, mengikuti jenjang tahap demi tahap menuju ke arah kemajuan (progresif), ke arah yang lebih sempurna. Paradigma

teori evolusionisme, relevan digunakan dalam penelitian ini, untuk mengetahui perkembangan masyarakat nelayan di pesisir Waingapu, dalam upayanya untuk mencapai kemajuan.

3. Teori Modernisasi

Suriasumantri (1987:49–51, dalam Daeng, 2008:47) mengemukakan wawasannya tentang hakikat modernisasi. Modernisasi adalah proses pembaharuan masyarakat tradisional (konvensional) menuju masyarakat yang lebih maju, dengan mengacu kepada nilai-nilai modernitas yang bersifat universal tersebut. Modernisasi sebagai upaya pembaharuan dalam kehidupan suatu bangsa, biasanya tumbuh sebagai akibat dari dua penyebab utama, *pertama*, perubahan tentang hidup dan kehidupan sebagai akibat peningkatan kecerdasan. *Kedua*, keterikatan dan ketergantungan umat manusia secara universal, baik secara ekonomis maupun sosial budaya. Modernisasi pada hakikatnya merupakan serangkaian perubahan nilai-nilai dasar yang berupa nilai teori, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai kuasa (politik), nilai estetika, dan nilai agama. Sehubungan dengan hal tersebut, lebih lanjut ia juga mengungkapkan bahwa untuk dapat mengubah orientasi nilai budaya suatu masyarakat, dibutuhkan cara-cara untuk menopang pendidikan yang diberikan, yakni: (1) pemberian contoh yang benar; (2) mengadakan sistem perangsang yang sesuai; (3) persuasif dan kampanye; (4) pembinaan dan pengasuhan terhadap generasi baru yang dilakukan secara dini dalam lingkungan keluarga. Teori Modernisasi seperti yang dikemukakan Suriasumantri, relevan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian mengenai masyarakat nelayan di pesisir Waingapu, bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keberadaan masyarakat nelayan yang ada di sana, yang nantinya yang

sudah tentu memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan suatu pembaharuan masyarakat, menuju masyarakat yang lebih maju. Dengan demikian, penelitian ini nantinya ada manfaatnya bagi kehidupan masyarakat nelayan, khususnya yang tinggal di pesisir Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II

SUMBA TIMUR: WILAYAH DAN MASYARAKATNYA

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian, yang mencakup kondisi geografi, kondisi demografi serta kondisi budaya.

A. Kabupaten Sumba Timur

1. Kondisi Geografi Kabupaten Sumba Timur

Pulau Sumba terletak di barat daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, kurang lebih 96 km di sebelah selatan Pulau Flores, 295 km di sebelah barat daya Pulau Timor dan 1.125 km di sebelah barat Laut Darwin, Australia. Pulau Sumba berada pada busur luar Kepulauan Nusa Tenggara dan pada busur tersebut Pulau Sumba terletak antara Pulau Sumbawa dan Pulau Timor. Secara astronomis Sumba Timur membentang antara $119^{\circ} 45' - 120^{\circ} 52'$ BT dan $9^{\circ} 16' - 10^{\circ} 20'$ LS.

Secara geografis kewilayahan, Kabupaten Sumba Timur berbatasan dengan wilayah disekitarnya. Adapun batas-batas wilayah kabupaten ini meliputi:

- Di sebelah utara berbatasan dengan Selat Sumba
- Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia

- Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sumba Barat
- Di sebelah timur berbatasan dengan Laut Sabu.

Kabupaten Sumba Timur mempunyai luas wilayah 7.000,5 km² atau 700,500 ha, dengan bagian terbesar adalah daratan bagian timur Pulau Sumba, dan 4 pulau kecil yaitu pulau Salura dengan luas 3,50 km², Pulau Mengkudu dengan luas 0,2 km², Pulau Kotak seluas 1 km² dan Pulau Nusa seluas 0,55 km².

Secara administratif, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur membawahi 22 (dua puluh dua) kecamatan. Di mana kecamatan-kecamatan tersebut antara lain:

1	Kecamatan Lewa	12	Kecamatan Ngadu Ngala
2	Kecamatan Nggaha Ori Angu	13	Kecamatan Pahunga Lodu
3	Kecamatan Lewa Tidahu	14	Kecamatan Wula Waijelu
4	Kecamatan Katala Hamu Lingu	15	Kecamatan Rindi
5	Kecamatan Tabundung	16	Kecamatan Umalulu
6	Kecamatan Pinu Pahar	17	Kecamatan Pandawai
7	Kecamatan Paberiwai	18	Kecamatan Kambata Mapambuhang
8	Kecamatan Karera	19	Kecamatan Kota Waingapu
9	Kecamatan Matawai La Pawu	20	Kecamatan Kambera
10	Kecamatan Kahaungu Eti	21	Kecamatan Haharu
11	Kecamatan Mahu	22	Kecamatan Kanatang

2. Sejarah Kabupaten Sumba Timur

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Pulau Sumbawa, Flores, Sumba, Timor dan Kepulauannya tergabung dalam satu kesatuan wilayah administratif, yang waktu itu disebut Keresidenan Timor. Konstelasi Pemerintahan yang dianut Pemerintah Hindia Belanda sesuai dengan landasan politik yang bertujuan untuk menjamin kepentingan penjajah ialah tetap mengakui kedaulatan swapraja di bawah pimpinan raja-raja, yang seluruhnya berjumlah

48 swapraja. Hal tersebut diatur dalam perjanjian politik yang dikenal dengan *korte verklaring*. Dengan demikian hubungan antara raja-raja dengan Pemerintahan Hindia Belanda seolah-olah berada dalam kedudukan yang sama. Namun dalam kenyataannya, politik ini jelas hanya menguntungkan pemerintah kolonial. Pemerintahan di Keresidenan Timor pada zaman Hindia Belanda dipegang oleh seorang pangreh praja Belanda yang bergelar residen dan dibantu oleh asisten residen. Dalam perkembangan selanjutnya Keresidenan Timor dibagi dalam *afdeling-afdeling* Sumbawa, Flores, Sumba, Timor dan masing-masing *afdeling* dikepalai oleh seorang asisten residen. Di bawah *afdeling* terdapat *onder afdeling* yang meliputi beberapa swapraja yang dikepalai oleh seorang kontrolir (*controleur*) dengan dibantu oleh beberapa *bestuur* asisten pribumi.

Konstelasi tersebut berlaku terus sampai dengan masa pemerintahan bala tentara Jepang. Masa pemerintahan pendudukan Jepang tidak berlangsung lama, kurang lebih 3 tahun, Kepulauan Indonesia Timur dipegang oleh angkatan laut Jepang (*kaigun*) yang berpusat di Makassar, yang menjalankan roda pemerintahan sipil ialah seorang yang bergelar *minsaiifu*, bekas *afdeling* diubah menjadi *ken*, *ken* yang dibagi dalam *bunken* adalah swapraja.

Pada waktu bala tentara Jepang menyerah kepada Sekutu tanggal 14 agustus 1945, Pemerintah Hindia Belanda turut membonceng masuk ke Indonesia yang dikenal dengan pemerintahan NICA. Belanda kembali menguasai bekas Keresidenan Timor dan menjalankan politik pecah belahnya dengan maksud menghancurkan Republik Indonesia. Pada 1950 terbentuk Negara Indonesia Timur (NIT) di mana swapraja-swapraja yang ada dikonsolidir dengan membentuk federasi raja-raja.

Dengan Undang-Undang NIT Nomor 44 Tahun 1950 buatan Hindia Belanda, federasi swapraja diberi status daerah yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri sehingga masing-masing swapraja yang ada di daerah Flores, Sumba, Timor dan Kepulauannya merupakan bagian dari daerah itu; namun dipihak lain berlaku pula Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, sehingga terjadi *dualisme* pelaksanaan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang ini, DPRD yang ada berjalan terus dengan ketentuan bahwa tugas legislatif sepenuhnya dipegang oleh Dewan Pemerintah Harian, sedangkan Dewan Rajaraja dihapus karena tidak sesuai dengan aspirasi politik saat itu di mana bentuk Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 dibentuk Provinsi Administrasi Sunda Kecil yang meliputi 6 (enam) daerah, termasuk Flores, Sumba, Timor dan kepulauannya yang dengan Undang-Undang Darurat Nomor 9 tahun 1954 (Lembaran negara Tahun 1954 Nomor 66) Nama Sunda Kecil diganti dengan Nusa Tenggara.

Guna mencegah kesimpangsiuran tafsiran dan pengertian mengenai Daerah Otonom, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, pada 1958 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 115) yang membentuk 3 (tiga) Daerah Tingkat I dalam Wilayah Provinsi Administratif Nusa Tenggara termasuk Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang meliputi daerah Flores, Sumba, Timor dan kepulauannya. Pada waktu yang sama, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-

Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dibentuklah 12 (dua belas) Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur termasuk Daerah Tingkat II Sumba Timur, dengan demikian secara *de jure*, roda pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Sumba Timur sudah ada pada waktu itu, sedangkan secara *de facto* baru berlaku sejak 20 Desember 1958 yaitu sesudah dibubarkannya bekas daerah Flores, Sumba, Timor dan Kepulauannya sekaligus pada tanggal tersebut Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur: W. J. Lalamentik meresmikan 5 (lima) Kabupaten di Timor termasuk Alor, 2 (dua) Kabupaten di Sumba dan 5 (lima) Kabupaten lainnya di Flores. Mulai saat pembentukan tanggal 20 Desember 1958, bekas Kepala Daerah dari Daerah bentuk lama ditugaskan sebagai Pembantu Kepala Daerah dalam wadah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dan segala urusan Rumah tangga daerah Swapraja yang tidak termasuk urusan Pemerintah Pusat, menjadi urusan Tingkat II yang bersangkutan. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 18/Des.15/2/23, Tanggal 15 Desember 1960, terhitung mulai 1 Januari 1961 anggaran belanja swapraja-swapraja dibuat dan dimasukkan dalam anggaran belanja daerah-daerah tingkat II yang meliputinya.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT Nomor Pem. 66/1/35, Tanggal 5 Juni 1962 dibentuk 64 Kecamatan di Provinsi NTT termasuk 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Sumba Timur, suatu indikasi ke arah penghapusan swapraja secara bertahap. Dengan demikian secara *de facto*, 45 swapraja yang ada di Provinsi NTT saat itu sudah dihapus, namun secara *de jure* baru pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, di mana 7 (tujuh) di antaranya ada di

Kabupaten Sumba Timur yakni Swapraja: Kanatang-Kapunduk; Lewa-Kambera; Tabundung; Melolo; Rindi; Mangili; Waijilu dan Swapraja Masu-Karera. Dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumba Timur Nomor 26/DD/1/11, Tanggal 27 Juli 1962 dibentuk 99 Desa Gaya Baru di Kabupaten Sumba Timur dari penyatuan 310 buah kampung yang ada pada waktu itu. Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT Nomor 11 tahun 1970 dibentuk Koordinator Pemerintahan Kota Waingapu, Perwakilan Kecamatan Pandawai-Haharu dan Perwakilan Kecamatan Paberiwai-Ngadu Ngala yang dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 Nomenklatur Perwakilan Kecamatan dirubah menjadi Kecamatan Pembantu. Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT, pada 1981 dibentuk 5 (lima) kelurahan di Kabupaten Sumba Timur yakni 4 (empat) Kelurahan di Kopeta Waingapu dan 1 (satu) Kelurahan di Kecamatan Lewa dan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Kelurahan-Kelurahan persiapan di Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, telah disahkan pembentukan Kelurahan di mana antara lainnya 5 (lima) Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Timur, yakni kelurahan: Lambanapu, Mauliru, Kawangu, Kaliuda dan Kelurahan Lumbukori.

Selanjutnya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT Nomor 385 Tahun 1998 tentang pengukuhan 316 desa/kelurahan persiapan dan eks unit pemukiman transmigrasi menjadi desa/kelurahan definitif di Provinsi Dati I NTT, dibentuk lagi 5 (lima) kelurahan di Kabupaten Sumba Timur yakni 3 (tiga) kelurahan di Kecamatan Haharu serta di Kecamatan Tabundung dan Kecamatan Paberiwai masing-masing 1 (satu) Kelurahan.

Memasuki zaman otonomi daerah, sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dilakukan lagi penataan kewenangan dan kelembagaan antara lain pembentukan 7 (tujuh) kecamatan baru yang merupakan peningkatan status kecamatan pembantu dan pemekaran dari kecamatan-kecamatan yang sudah ada, masing-masing dengan Perda Kabupaten Sumba Timur Nomor 17 Tahun 2000 (Kecamatan Karera, Kahaungu Eti, Wulla Wajjilu), Nomor 18 Tahun 2000 (Kecamatan Pinu Pahar), Nomor 26 Tahun 2000 (Kecamatan Rindi), Nomor 27 Tahun 2000 (Kecamatan Matawai La Pawu) dan Nomor 28 Tahun 2000 (Kecamatan Nggaha Ori Angu). Sejalan dengan itu pula dengan Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 131/146.1/19/1/KTB/2001 dikukuhkan 16 desa hasil pemekaran menjadi desa definitif. Kemudian melihat perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di beberapa kelurahan maka melalui Perda Nomor 13 tahun 2002, sebanyak 5 (lima) kelurahan yakni Kelurahan Kaliuda, Billa, Kuta, Rambangaru dan Kananggar dirubah statusnya menjadi desa Dengan penetapan tersebut maka wilayah Kabupaten Sumba Timur terdiri dari 15 kecamatan, 123 desa dan 16 kelurahan. Sampai dengan tahun 2007 telah dilakukan pemekaran kecamatan/kelurahan/desa menjadi 22 kecamatan, 16 kelurahan dan 140 desa, dengan pimpinan daerah sejak awal terbentuknya Kabupaten Sumba Timur.

3. Religi Masyarakat Sumba

Layaknya suku-suku di Indonesia, Sumba memiliki kepercayaan aslinya atau yang dalam ilmu sosiologi agama disebut dengan agama suku. Agama suku Sumba dikenal dengan nama *Marapu*. Marapu merupakan kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Agama asli inilah yang membuat seluruh dunia menjuluki Pulau Sumba sebagai *Tanah Marapu*. Kepercayaan Marapu pun di bagi dalam 4 bagian (Wellem, 2004:42–48) yaitu:

a. Kepercayaan terhadap Ilah tertinggi

Dalam agama Marapu, roh nenek moyang bukanlah ilah tertinggi namun Ilah yang tertinggi disebut sebagai *Pande Peku Tamu-Pande Nyura Nggara* artinya 'yang tak bernama'. Maksud dari tak bernama adalah bukan berarti bahwa Ilah itu nihil, tapi maksudnya adalah nama Ilah itu keramat dan tidak boleh disebut sesuka hati dan hanya boleh disebut dalam upacara Pamangu Ndewa yang berarti 'perjamuan Ilahi' karena dapat membawa petaka. Nama Ilah itu adalah *Anatala*. Sehingga masyarakat Marapu tidak pernah menyebut nama sang Ilah, mereka hanya menyebut sang Ilah dengan sebutan *Pande Peku Tamu-Pande Nyura Nggara*. Tak ada dewa atau ilah lain dari pada Ilah yang tertinggi. Dalam marapu memiliki kepercayaan akan Ilah yang Esa walaupun mereka juga menghormati roh nenek moyang.

b. Kepercayaan terhadap roh leluhur

Arwah leluhur dalam Marapu dipercaya dapat membawa petaka. Berdasarkan kedudukannya roh leluhur dibagi menjadi 2 yaitu maha leluhur (*marapu rato*), leluhur biasa (*marapu*). Sedangkan berdasarkan daerah kuasanya roh leluhur dibagi atas 3 yaitu:

- *Marapu kilat* (roh leluhur yang menguasai kilat dan guntur), *marapu* ini berkuasa menjaga ternak dan harta benda. Apabila ada orang yang mencuri maka *marapu* ini akan mengirim peringatan 3 kali dalam bentuk kilat dan Guntur, dan apabila sampai pada peringatan ke-3 tidak digubris, walaupun cuaca cerah kilat akan menyambar kearah si pencuri hingga si pencuri hangus. Kejadian ini sering terjadi berulang kali di daerah Sumba. Namun setelah zending masuk ke Sumba penyembahan terhadap *marapu* kilat berkurang.

- *Marapu tana* (roh leluhur yang menguasai tanah dan hasil bumi). *Marapu* ini dipercaya memberikan kesuburan pada tanah dan kelimpahan hasil bumi. Sebelum panen masyarakat harus memberi persembahan kepada *marapu* ini. Setelah panen, hasil panen tidak boleh dimakan sebelum bersyukur kepada *marapu tana* dan pada Sang Ilah Tertinggi. Jika ketentuan ini dilanggar maka akan terjadi bencana kelaparan. Dalam cerita rakyat “*Ndelo dan Kyase*”, dikisahkan bahwa *marapu tana* dapat memberikan keturunan bagi orang yang susah mendapat anak atau bahkan mandul.
- *Marapu wai* (roh leluhur yang berkuasa atas air dan segala isinya). *Marapu* ini dipercaya berkuasa dalam memberikan hasil laut yang melimpah. Cara penyembahan terhadap *marapu* ini tidak diketahui dengan jelas.

c. Kepercayaan terhadap roh halus

Roh halus dalam agama Marapu ada 4 macam yaitu:

- *Maramba tana* (roh tanah), ia memiliki persamaan dengan *marapu tana* namun yang menjadi perbedaannya ialah *maramba tana* hanya menguasai tempat tertentu saja. Apabila ingin memindahkan roh ini maka perlu diadakan upacara keagamaan. Roh ini termasuk dalam golongan roh yang baik.
- *Yora panggga* (roh sahabat berjalan), roh ini bila diberi persembahan maka ia akan selalu menjaga dan akan membawa keberhasilan dari setiap perjalanan.
- *Yora patuna* (roh sahabat berjalan ke alam gaib), roh ini menuntun seseorang yang ingin memperoleh kesaktian, kekayaan, dan lain-lain kealam gaib. Roh ini sekaligus melindungi dari 4 hantu (*Patau wai/Hantu laut, patau wangga/hantu beringin, patau omang/hantu hutan, dan*

patau tana/hantu tanah) pengganggu dalam perjalanan gaib maupun perjalanan biasa.

- *Wandi* (roh jahat/perasuk), roh ini di bedakan menjadi 3 yaitu.
 - *Wandi mamarungu* (roh *suanggi*/penyihir), ialah roh yang dapat membuat seseorang menjadi *suanggi* yang dapat menyihir orang lain hingga mati. Jika diketahui seseorang diketahui memiliki roh *suanggi* maka orang itu akan diusir, dianiaya, dan dibunuh.
 - *Wandi kambaliku* (roh penipu), roh ini menyebabkan seseorang menjadi suka menipu.
 - *Wandi kambu* (roh perut), apabila roh ini masuk ke dalam perut seseorang, orang itu akan menjadi rakus dan walaupun ia sudah makan sangat banyak dia tidak akan kenyang.

d. Kepercayaan terhadap kekuatan sakti

Orang Sumba percaya akan adanya kekuatan-kekuatan sakti yang dapat dimiliki oleh seseorang dengan belajar pada orang/ makhluk yang sudah memiliki kesaktian tersebut. Orang-orang yang memiliki kesaktian seperti itu sangat disegani dan dihormati bahkan ditakuti. Kekuatan sakti tersebut juga dipercaya ada pada hewan, tanaman dan benda peninggalan nenek moyang atau Marapu.

4. Karya Seni dan Sastra Suku Sumba

a. Karya seni

Karya seni yang terkenal dari Pulau Sumba kebanyakan berasal dari zaman megalitik kecuali tenunan. Beberapa karya seni dari sumba adalah:

- *Mamoli*, ialah perhiasan telinga wanita dan dapat juga digantung pada *muti* dan terbuat dari emas muda.
- *Muti*, ialah kalung yang terangkai dari serangkaian biji

kecil yang terbuat dari kayu atau biji tertentu. Biji yang digunakan untuk *mamoli* berasal dari kayu atau biji yang keras dan tahan lama. Untuk biji yang terbuat dari bahan biji yang besar, biji yang besar itu dan halusakan hingga bulat, halus, dan kecil.

- Patung dan tugu, patung dan tugu yang dibuat biasanya terbuat dari batu yang diambil dari atas gunung (batu yang dipilih bersifat keras namun mudah di bentuk) yang kemudian dipahat.
- Makam megalitik, makam ini terbuat dari batu gunung yang besar dan memiliki berat yang luar biasa. Pengangkatan batu ini memiliki tata cara khusus, dan yang menjadi ketentuan utama adalah jika orang yang mati itu adalah bangsawan maka dalam menarik batu itu diperlukan orang yang sangat banyak dan yang paling penting harus ada orang bangsawan yang menari di atas batu itu sebelum ditarik. Karena apabila tidak maka walaupun beribu-ribu orang yang menarik maka batu itu tak akan bergeser sejenkal pun.
- Seni tari pasola, ini adalah tari eksotik yang butuh kesiapan mental. Karena menari tarian ini layaknya perang yang sesungguhnya. Sehingga sering kali tari ini menyebabkan korban luka-luka bahkan jiwa.
- Tenunan, tenunan dari sumba memiliki kekhasannya sendiri, yang paling khas dari tenunan ini adalah komposisi warna yang terang berpadu gelap dan corak motifnya yang rumit.

b. Karya sastra

Karya sastra Sumba tidak ada yang dalam bentuk tulisan. Semua karya yang ada diturunkan secara lisan oleh leluhur kepada

generasi-generasi penerusnya hingga sekarang. Berikut sastra lisan yang ada di Sumba:

- *Li'i marapu* (hikayat leluhur), ini adalah sastra Sumba yang terkenal dan tertua. Sastra ini menceritakan tentang kisah perjalanan para leluhur hingga sampai di Sumba, pembagian wilayah kekuasaan para leluhur, dan riwayat hidup para leluhur.
- *Lawiti laluku humba* (pola peribahasa dan puisi sumba), sastra ini berisi ungkapan-ungkapan dan peribahasa dalam bahasa Sumba. Sastra lisan ini pada 1987 dicetak dalam sebuah buku berjudul sama disusun oleh Dr. (HC) Umbu Hina Kapita.
- Cerita rakyat, sastra ini sama seperti cerita rakyat pada lazimnya. Beberapa cerita rakyat Sumba yang terkenal antara lain "Ndelo dan Kyase", "Umbu Ndelu A Kataru", "Rambu Kehi Padua Omang", "Pareji Sahatku", "Penemuan Padi", "Mori Ana Koda-Sape Ana Rato", "Rambu Humba", dan lain-lain.

B. Kelurahan Kamalaputi

Kelurahan Kamalaputi merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur yang berada dalam wilayah kerja Kecamatan Kota Waingapu. Pembentukan Kelurahan Kamalaputi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sumba Timur. Lurah sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja kelurahan dibantu oleh perangkat Kelurahan Kamalaputi telah melayani seluruh aspek pelayanan baik dibidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan bagi

masyarakat Kelurahan Kamalapati sejalan dengan Catur Program Generasi ke-III Pemerintah Kabupaten Sumba Timur tahun 2010–2015 dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Sumba Timur yang “Sejahtera, Mandiri, Adil, Religius, Terdepan”.

Wilayah Pemerintahan Kelurahan Kamalapati dengan luas 2,80 km² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Laut Sabu
- Sebelah Selatan : Kelurahan Prailiu
- Sebelah Timur : Kelurahan Prailiu
- Sebelah Barat : Kelurahan Matawai dan Kelurahan Hambala.

Jumlah Penduduk Kelurahan Kamalapati pada 2013 adalah 7.287 jiwa, yang terdiri dari 1.672 KK. Data penduduk ini berdasarkan pelaksanaan kegiatan Profil Kelurahan yang dilaksanakan pada Maret sampai April 2013 dengan mengambil data pada setiap masyarakat yang telah memiliki dan terdaftar dalam kartu keluarga dan data penduduk, tidak termasuk data mutasi penduduk pindah datang dan penduduk pindah keluar Kelurahan Kamalapati.

1. Kondisi Penduduk

Kondisi penduduk di Kelurahan Kamalapati berdasarkan jenis kelamin, tingkatan umur, agama dan mata pencaharian dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Laki-laki	:	3.741 Jiwa
Perempuan	:	3.546 Jiwa
Jumlah	:	7.287 Jiwa

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Kamalapati tahun 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kelurahan Kamalapati terdiri dari laki-laki sejumlah 3.741 jiwa dan perempuan sejumlah 3.546 jiwa. Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan di Kelurahan Kamalapati seimbang. Hal ini berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diselenggarakan di kelurahan yang bersangkutan. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang seimbang akan sangat berpengaruh juga dalam pengambilan keputusan yang diambil secara voting. Sehingga sasaran pembangunan dan hasil pembangunan yang diselenggarakan akan dapat dinikmati dan mengampu kepentingan penduduk.

Adapun persebaran usia penduduk adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah Penduduk Menurut Usia

Usia		Jumlah
0–6 Thn	:	873 Jiwa
7–18 Thn	:	1857 Jiwa
19–25 Thn	:	912 Jiwa
26–39 Thn	:	1752 Jiwa
40–55 Thn	:	1255 Jiwa
56–64 Thn	:	383 Jiwa
+ 65 Thn	:	255 Jiwa
Jumlah	:	7287 Jiwa

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Kamalapati tahun 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk yang tergolong usia produktif cukup banyak, bisa dikatakan bahwa hampir setengah dari total jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Kamalapati berada pada usia produktif. Hal ini menunjukkan indikator yang cukup positif, dalam pelaksanaan program pembangunan. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan

pembangunan bisa dikatakan memadai. Pemerintah kelurahan pada khususnya bisa mengajak komponen masyarakat di usia produktif ini untuk berpikir bersama dalam menyusun rencana program pembangunan di wilayah kelurahan, serta sendi-sendi perekonomian akan memberikan pengharapan yang cukup positif. Namun penduduk yang tergolong dalam usia nonproduktif pun harus mendapatkan perhatian yang baik, terutama dalam hal sarana serta prasarananya. Jumlah penduduk yang berusia +65 tahun yang cukup rentan dengan masalah kesehatan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah serta komponen masyarakat lainnya, salah satunya dengan mengadakan fasilitas-fasilitas layanan kesehatan yang bisa diakses oleh mereka secara mudah.

Keragaman agama yang terdapat di Kelurahan Kamalapati memberikan signal bahwa kelurahan ini harus mengembangkan toleransi hidup beragama di masyarakatnya dengan cukup serius. Sehingga tidak mudah dimasuki isu sara yang mampu merusak ketahanan sosial masyarakat. Persebaran penduduk menurut agama dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3

Jumlah Penduduk Menurut Agama

Islam	:	4.818 Jiwa
Kriten Protestan	:	2.067 Jiwa
Kristen Katolik	:	348 Jiwa
Hindu	:	50 Jiwa
Buddha	:	0 Jiwa
Kepercayaan Lainnya	:	3 Jiwa
Jumlah	:	7.287 Jiwa

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Kamalapati tahun 2013

Dari tabel di atas diketahui bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Kamalapati adalah beragama Islam, yakni dengan

jumlah pemeluk 4.818 jiwa. Sedangkan pada posisi kedua adalah agama Kristen Protestan, dengan jumlah pemeluk 2.067 jiwa.

Komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan didasarkan pada kegiatan ekonomi atau jenis usaha yang digeluti masyarakat. Dari data tahunan Kelurahan Kamalapati dapat diketahui jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan/ mata pencaharian sebagai berikut:

Tabel 4
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Anggota TNI	:	3 Jiwa
Anggota POLRI	:	33 Jiwa
PNS Umum	:	214 Jiwa
Perawat	:	14 Jiwa
Bidan	:	11 Jiwa
Guru	:	134 Jiwa
Pegawai Swasta/Lainnya	:	114 Jiwa
Honor/PTT	:	113 Jiwa
Ulama/Ustad	:	1 Jiwa
Pendeta	:	5 Jiwa
Pastor	:	3 Jiwa
Petani	:	114 Jiwa
Nelayan	:	254 Jiwa
Pedagang/Wiraswasta	:	764 Jiwa
Penjahit	:	21 Jiwa
Buruh	:	83 Jiwa
Tukang	:	50 Jiwa
Sopir	:	39 Jiwa
Ojek	:	46 Jiwa
Pelajar	:	2087 Jiwa
Mahasiswa	:	299 Jiwa
IRT	:	1178 Jiwa
Belum Bekerja	:	1214 Jiwa
Lainnya	:	493 Jiwa
Jumlah	:	7287 Jiwa

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Kamalapati tahun 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Kelurahan Kamalapati adalah wiraswasta sejumlah 764 jiwa, PNS sejumlah 214 jiwa, petani sejumlah 21 jiwa, guru

sejumlah 314 jiwa, dan pelajar sejumlah 2.087 jiwa, nelayan sejumlah 254 jiwa.

Jumlah penduduk yang masih pelajar dengan jumlah 2.087 jiwa memberikan perhatian khusus kepada pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam menyediakan fasilitas-fasilitas di bidang pendidikan. Selain jumlah lembaga pendidikan yang harus memadai, sarana penunjang lainnya seperti perpustakaan baik di lingkungan lembaga pendidikan maupun perpustakaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten harus mampu memberikan kepustakaan yang menunjang bagi proses pendidikan.

Geliat perekonomian dari bidang wiraswasta di Kelurahan Kamalapati cukup bagus, dengan jumlah penduduk yang menggeluti bidang ini sejumlah 764 jiwa. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan harus memberikan akses yang terbuka demi kelancaran dan perkembangan sektor ini.

Komposisi penduduk yang menggeluti sebagai nelayan sejumlah 254 jiwa juga memberikan gambaran bagaimana roda perekonomian di dukung dari sektor ini. Mengingat negara kita merupakan negara kepulauan dan wilayah Kabupaten Sumba Timur yang dikelilingi oleh wilayah perairan, maka sektor ini juga harus mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah sebagai pemegang kebijakan. Program-program pembangunan dan pengembangan di sektor ini harus lebih dipacu sehingga nelayan-nelayan dari wilayah Kabupaten Sumba dan nelayan di Kelurahan Kamalapati mampu berproduksi dengan baik. Salah satu bentuk perhatian pemerintah yang telah diberikan untuk mengembangkan sektor nelayan ini adalah dengan dikucurkannya bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur. Bantuan berupa alat tangkap pukat yang dibagikan kepada 8 orang nelayan di Kelurahan Kamalapati yakni:

No	Nama Nelayan	Bantuan
1	Abdul Rasyid Umar Abdul Kadir	3 Piece Pukat multifilamen ukuran 2 $\frac{1}{2}$ "
2	Muhammad Ibrahim	3 Piece Pukat multifilamen ukuran 2 $\frac{1}{2}$ "
3	Ismail Zakaria	3 Piece Pukat multifilamen ukuran 2 $\frac{1}{2}$ "
4	Yohanis Lulu	3 Piece Pukat monofilamen ukuran 1 $\frac{1}{4}$ "
5	Zainudin Kasim	3 Piece Pukat monofilamen ukuran 1" 2 Piece Pukat multifilamen ukuran 2"
6	Ramadan Hasan	3 Piece Pukat monofilamen ukuran 1" 3 Piece Pukat multifilamen ukuran 2"
7	Ruslan Karipi	3 Piece Pukat monofilamen ukuran 1" 3 Piece Pukat multifilamen ukuran 2 $\frac{1}{2}$ "
8	Alfian Hasan	3 Piece Pukat monofilamen ukuran 1" 2 Piece Pukat multifilamen ukuran 2"

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Kamalapati Tahun 2013

2. Kondisi Kesehatan Penduduk

Telah dibentuknya Kepengurusan Posyandu berdasarkan Surat Keputusan Lurah Kamalapati Nomor 463/04/Kesos/KMP/2013-D tentang Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokja Posyandu) Kelurahan Kamalapati, tertanggal 7 Januari 2013. Untuk Kelurahan Kamalapati telah dibentuk 9 Pos Pelayanan terpadu yakni: Posyandu Bunga Bakung; Posyandu Kolam Lumpur; Posyandu Nelayan; Posyandu Nangka; Posyandu Permata Hati; Posyandu Andali; Posyandu Gaharu (Lansia), Posyandu Cendana (Lansia) dan Posyandu Jati (Lansia).

Jumlah Kader Kelurahan Kamalapati: 51 orang

Nelayan	: 5 orang,
Bunga bakung	: 5 orang,
Permata Hati	: 7 orang,
Kolam Lumpur	: 5 orang,
Andali	: 5 orang,
Nangka	: 6 orang,
Gaharu	: 5 Orang
Jati	: 5 Orang
Cendana	: 8 orang.

- Jumlah pasien balita: 596 orang (laki-laki 277 orang dan perempuan 319 orang)
- Jumlah pasien lansia: 149 orang (laki-laki 52 orang dan perempuan 97 orang)
- Jumlah penderita gizi buruk: 27 orang (laki-laki 11 orang dan perempuan 16 orang)
- Jenis imunisasi yang diberikan: campak, BCG, polio, DPT, hepatitis B
- Jenis penyakit yang banyak diderita oleh lansia: hipertensi; reumatik; dan ISPA (batuk, pilek)
- Jumlah peserta KB: 826 orang

Pengguna Alat Kontrasepsi:

- Pil : 200 orang
- IUD/Spiral : 115 orang
- Kondom : 6 orang
- MOP/Vasektomi : 2 orang
- MOW/Tubektomi : 30 orang
- Suntik : 630 orang
- Implant : 240 orang

Tingkat kesadaran warga masyarakat (ibu hamil) untuk memanfaatkan sarana kesehatan yang berada di Kelurahan Kamalapati/Kecamatan Kota Waingapu untuk memeriksakan kehamilan/melahirkan semakin membaik. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah terkait Revolusi KIA.

Jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh posyandu selama 2013:

- a. Pemeriksaan kesehatan oleh dokter puskesmas, perawat puskesmas dan bidan kelurahan;
- b. Kegiatan penyuluhan;
- c. Pemberian makanan tambahan per triwulan;
- d. Arisan bulanan;
- e. Pelatihan/penyegaran kader;
- f. Pendataan balita;
- g. Kerja bakti;
- h. Perkunjungan.

BAB III

KEBERADAAN MASYARAKAT NELAYAN DI PESISIR WAINGAPU, KABUPATEN SUMBA TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Awal Mula Keberadaan Masyarakat Nelayan di Pesisir Waingapu, Sumba Timur

Masyarakat Sumba Timur bersifat heterogen, baik dari segi mata pencaharian, suku bangsa maupun agamanya. Penduduk Sumba Timur cukup beragam, selain orang Sumba Timur asli, juga terdapat orang Sabu, keturunan Cina, Arab, Bugis, Jawa dan mereka yang berasal dari pulau-pulau Nusa Tenggara lain (Anggraeni, 2005:14). Penduduk yang beragam baik etnis maupun agama, pada umumnya memiliki rasa persaudaraan yang kuat dan hidup berdampingan dengan damai. Khusus masyarakat pesisir Sumba Timur terutama nelayan, sudah ada sejak zaman dahulu. Masyarakat pesisir mempunyai ciri khas tersendiri, bila dibandingkan dengan masyarakat petani yang lain, seperti petani sawah, petani ladang, peternak dan lain-lain.

Mengenai keberadaan masyarakat nelayan di Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan tulisan yang telah ada, menjelaskan bahwa leluhur masyarakat Sumba Timur berasal dari Semenanjung Malaka melalui

Kepulauan Riau, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Roti, Sawu, dan akhirnya tiba di Tanjung Sasar (Sumba). Orang Sumba datang ke Pulau Sumba dalam beberapa gelombang. Mereka memasuki pulau Sumba pada dua tempat utama, yaitu Tanjung Sasar dan muara Sungai Pandawai (Kambaniru), dan dari sana mereka menyebar ke seluruh penjuru Sumba. Catatan pertama mengenai masyarakat Sumba terdapat dalam kitab *Negarakertagama*, karangan Empu Prapanca, yang mengatakan bahwa pulau ini termasuk daerah jajahan Kerajaan Majapahit, seperti dijelaskan dalam kutipan berikut ini.

Di sebelah timur tanah Jawa terdapat tanah jajahan: semua Kepulauan Makassar serta Buton, Banggawi Kunir, Galian serta Salaya, Sumba, Solor, Muar, Timor beserta pelbagai pulau yang penting (Wellems, 2004:16).

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa, kedatangan orang-orang Sumba ke Pulau Sumba, sudah berlangsung sejak dahulu, yaitu sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit. Menurut De Roo van Alderwerelt, pengaruh kekuasaan Majapahit di Sumba tidak dirasakan sama sekali, namun bekas-bekas yang menandai bahwa Sumba pernah menjadi jajahan Majapahit terdapat pada sebutan terhadap raja-raja Sumba, yaitu Hundarangga-Ruupatola. Sebutan ini timbul karena raja-raja Sumba memiliki kain sutra dan *patola* yang dianugerahkan oleh Kerajaan Majapahit.

Kedatangan penduduk luar ke Pulau Sumba terus berlangsung hingga sekarang. Mereka menempati daerah-daerah kosong, termasuk wilayah di pesisir Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Berdasarkan keterangan masyarakat pesisir Waingapu, mengatakan bahwa leluhur mereka berasal dari Bugis. Mereka datang berjumlah sekitar dua sampai

empat orang. Maksud kedatangannya ke daerah ini, bukan semata-mata untuk menangkap ikan, namun dibarengi pula dengan tujuan lain, yaitu melakukan *syiar* (penyebaran agama) Islam. Kedatangan mereka kemudian diikuti oleh orang-orang Bugis lainnya, serta masyarakat dari pulau lain, seperti Flores, dan Jawa. Mereka hidup rukun dan melakukan perkawinan secara *kawin-mawin* (kawin campur). Kedatangan masyarakat ke pesisir Waingapu pada umumnya dan di Kelurahan Kamalapati pada khususnya terus bertambah, seperti penuturan ketua kelompok nelayan tenggiri, berikut ini.

Ketua kelompok nelayan Tenggiri (Imam Ashari), menuturkan dirinya, bahwa dia termasuk salah satu pendatang, yang sekarang ini bertempat tinggal di pesisir Kelurahan Kamalapati. Kedatangannya ke Pulau Sumba pada 1984, adalah untuk mengadu nasib. Profesi yang ia miliki saat pertama datang adalah sebagai penjahit. Ia kemudian merubah profesi sebagai nelayan, setelah memperhatikan situasi dan keadaan alam lingkungan yang ada di sekitarnya. Profesinya sebagai penjahit tidak ditinggalkan begitu saja, namun digunakan sebagai mata pencaharian tambahan.

Berdasarkan penuturan yang dikemukakan oleh ketua kelompok nelayan di atas, dapat diketahui bahwa beliau adalah penduduk pendatang yang sekarang ini menetap tinggal di Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Sumba Timur. Hal itu menunjukkan bahwa mata pencaharian sebagai nelayan, bukan saja dilakukan oleh keturunan nelayan, namun pekerjaan sebagai seorang nelayan, dapat pula dikerjakan oleh orang yang bukan keturunan nelayan. Mata pencaharian sebagai nelayan di pesisir Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, sampai sekarang masih tetap bertahan.

B. Kondisi Alam dan Lingkungan Pesisir Waingapu, Sumba Timur

Kondisi alam dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang ada di sekitarnya. Masyarakat akan mengolah dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di sekeliling mereka. Kondisi iklim sangat menentukan pola kehidupan masyarakat. Seperti halnya dengan kondisi iklim Kabupaten Sumba Timur yang keras ditambah dengan keadaan topografi yang berbukit-bukit karang, sangat tidak menguntungkan bagi pertanian pangan. Pertanian subsisten hanya pada tanah datar subur atau di daerah perbukitan, diusahakan pada cekung bukit. Itulah sebabnya mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Sumba Timur, terutama di pedesaan adalah beternak. Walau demikian ketersediaan air tanah dan aliran air sungai di Sumba Timur relatif lebih tinggi dibanding Sumba Barat. Mengingat kondisi alam Kabupaten Sumba Timur (seperti dijelaskan di atas), maka masyarakat di Kabupaten Sumba Timur, khususnya di wilayah pesisir, memanfaatkan wilayah pesisir, sebagai tempat atau lokasi untuk mencari nafkah. Pemanfaatan potensi wilayah pesisir, salah satunya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan usaha penangkapan ikan, baik dilakukan secara modern maupun tradisional. Di samping itu dapat pula melakukan usaha yang lainnya, seperti membuat garam, melakukan budidaya rumput laut, dan lain-lain. Semua usaha yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya. Mengenai kondisi alam dan lingkungan di pesisir Waingapu, dapat dilihat dalam Gambar 3.1. berikut ini.



Gambar 3.1. Kondisi Lingkungan di Pesisir Waingapu

Sumber: Dokumen Tim Penulis

Berdasarkan gambar 3.1. dapat diketahui bahwa kondisi pantai di pesisir Waingapu, khususnya di Kelurahan Kamalapati, gelombang air lautnya cukup tenang. Kondisi tersebut merupakan salah satu potensi yang sangat baik untuk menjalankan aktivitas sebagai nelayan. Air laut yang tenang, mengurangi resiko bahaya gelombang, yang acap kali mengancam keselamatan para nelayan. Meski airnya cukup tenang, pada musim-musim tertentu, gelombang airnya dapat berubah tinggi, sehingga perlu diperhatikan oleh para nelayan, terutama pada saat sedang menjalankan aktivitas. Sedangkan terkait dengan masalah abrasi, pemerintah bersama-sama dengan masyarakat setempat telah membuat tanggul guna menahan gelombang.

Aktivitas masyarakat di pesisir Waingapu, selain berprofesi sebagai nelayan, juga menjalankan usaha yang lainnya, seperti: pengangkutan barang-barang dan penyebrangan antarpulau terdekat, yakni Pulau Plores, Pulau Sabu, dan Pulau Timor. Usaha

pengangkutan barang dan penyebrangan yang dilakukan oleh masyarakat, didukung oleh adanya dermaga laut, yang dinamakan dermaga Waingapu. Dermaga Waingapu yang terletak di Kelurahan Kamalapati, termasuk dermaga yang usianya tergolong cukup lama, dan sudah beroperasi sejak zaman penjajahan Belanda.

C. Aktivitas Masyarakat Di Pesisir Waingapu, Sumba Timur

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa aktivitas masyarakat di pesisir Waingapu, selain berprofesi sebagai nelayan, juga melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, seperti: melakukan usaha pengangkutan barang-barang dan penyebrangan, berdagang, buruh angkut barang, dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan masyarakat, mengatakan bahwa mata pencaharian sebagai nelayan, khususnya masyarakat di Kelurahan Kamalapati, jumlahnya kurang lebih 200 orang, sedangkan bermata pencaharian sebagai pedagang berjumlah kurang lebih 30 orang. Banyaknya masyarakat yang menggeluti pekerjaan berdagang, karena didukung oleh kondisi lingkungan.

Kondisi lingkungan alam pesisir Waingapu, memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Hal tersebut dapat dinikmati ketika sedang bersantai di pinggir pantai. Pemandangan alam berupa perbukitan menambah pemandangan pesisir Waingapu. Apalagi sekarang ini telah dilakukan perbaikan dan perluasan Dermaga Waingapu, serta dibangun TPI (tempat pelelangan ikan). Bangunan tersebut dibangun digunakan sebagai tempat transaksi (jual-beli ikan), yang dihasilkan oleh nelayan. Dengan demikian, masyarakat yang berada di sekitar pesisir Waingapu, selain dapat memanfaatkan untuk melakukan berbagai kegiatan usaha, juga dapat digunakan untuk bersantai menikmati keindahan dan

pemandangan alamnya. Masyarakat, mulai dari anak-anak sampai dewasa, banyak yang datang ke daerah itu, khususnya pada sore hari. Kondisi ramai para pengunjung, dimanfaatkan dengan baik oleh pedagang untuk berjualan makanan dan minuman. Di halaman dermaga, masyarakat membangun rumah-rumah makan, dengan membuat bangunan semi permanen. Mereka melakukan aktivitas berjualan mulai sore hari, dan tutup sekitar pukul 10 malam.

Selain warung makan yang dibangun di kawasan dermaga, masyarakat juga mendirikan warung atau toko di luar, yaitu di sekitar pintu masuk dermaga. Mereka menjual berbagai kebutuhan pokok (sembako) dan gorengan. Mengingat ramainya pengunjung, salah satu pedagang gorengan sangat laris. Kenyamanan pengunjung untuk melakukan rekreasi, juga didukung oleh areal dermaga yang cukup luas. Luas areal dermaga Waingapu sekitar dua sampai tiga hektar. Seluruh areal dermaga diberi lantai semen (dibeton), sehingga sangat cocok digunakan tempat rekreasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa wilayah pesisir Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Hal tersebut perlu terus dikembangkan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang bertempat tinggal di sekitarnya. Dengan mengolah dan memanfaatkan lingkungan alam yang ada, salah satunya yaitu sebagai nelayan, telah memberi manfaat bagi masyarakat, dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat nelayan di pesisir Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dalam meningkatkan dan menjalin kerjasama, telah membentuk kelompok-kelompok nelayan. Kelompok nelayan di

pesisir Waingapu sekarang ini jumlahnya cukup banyak, beberapa kelompok nelayan di antaranya berada di Kelurahan Kamalapati. Masyarakat nelayan di Kelurahan Kamalapati, sampai sekarang ini, telah terbentuk tiga belas kelompok nelayan, dengan anggotanya kurang lebih dua ratus orang. Dua dari ketiga belas kelompok nelayan tersebut, di antaranya adalah kelompok nelayan Maju Bersama dan kelompok nelayan Tenggiri. Kelompok nelayan Maju Bersama sebagian besar bertempat tinggal di RT 9, Kelurahan Kamalapati, Kabupaten Sumba Timur. Kelompok nelayan Maju Bersama diketuai oleh Rajiman Abubakar, dengan jumlah anggota sebanyak sepuluh orang, yaitu: (1) Rajiman Abubakar (Ketua), (2) Usman Ismail (Bendahara), (3) Abdul Hamid (Sekretaris), (4) Iwan Abidin, (5) Amsaelong, (6) Herkules Lai, (7) Rudianto, (8) Rivan, (9) Tahabahmid, (10). Ahmad Bahmid

Sedangkan kelompok nelayan Tenggiri, anggota kelompoknya sebagian besar tinggal di RT 1 dan ketua kelompoknya adalah Imam Ashari. Anggota kelompok tenggiri terdiri atas, 16 anggota, yaitu: (1) Imam Ashari (Ketua), (2) Muhamad Ibrahim (Bendahara), (3) Ridwan Handoko (Sekretaris), (4) Abdulrahman Karim, (5) Marlan Bugis Abdullah, (6) Ibham Rabudin, (7) Edi Muhamad, (8) Abdulgani, (9) Agus Umbuhina, (10) Anjas Bahri, (11) Junaidi, (12) Abdulah Ibrahim, (13) Mustafa Ali, (14) Ridwan Handoko, (15) Ahmad Rizal, (16) Elo Ali.

Kelompok nelayan Maju Bersama maupun kelompok nelayan Tenggiri, sudah berdiri kurang lebih dua tahun, namun secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan kelompok, kurang lebih lima bulan yang lalu. Salah satu kegiatan rutin yang biasanya dilakukan adalah membuat laporan bulanan, mengadakan pertemuan kelompok, dan lain-lain. Pertemuan kelompok biasanya dilaksanakan setiap bulan. Kelompok juga membuat aturan-aturan kelompok, untuk menjaga

keutuhan dan keberlanjutan kelompoknya. Salah satu aturan kelompok yaitu memberikan sanksi kepada anggota kelompok yang melanggar aturan kelompok. Seperti contoh misalnya, apabila ada anggota kelompok yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh kelompok, anggota kelompok yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari anggota kelompoknya. Salah satu contohnya yaitu tidak membayar iuran bulanan. Mereka yang melanggar dari anggota kelompok, dapat digantikan oleh orang lain, berdasarkan kesepakatan seluruh anggota kelompok.

D. Alat Tangkap yang Digunakan Masyarakat Nelayan di Pesisir Waingapu

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan, termasuk kegiatan perikanan tangkap harus dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Dengan adanya sistem pengelolaan seperti itu, tidak akan membahayakan kelestarian target spesies. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal, terutama mengenai alat tangkap yang digunakan oleh nelayan. Alat tangkap yang digunakan harus mempunyai selektivitas yang tinggi, baik terhadap ukuran maupun terhadap jenis, yakni:

1. Tidak mengakibatkan tertangkapnya atau terancamnya kehidupan hewan atau tanaman air yang dilindungi dan aman bagi keanekaragaman hayati.
2. Tidak mengganggu keseimbangan ekologis, termasuk rendahnya *bycatch* dan pembuangan yang ditimbulkan.
3. Tidak merusak habitat.
4. Tidak membahayakan keselamatan pelaku penangkapan ikan dan konsumen

5. Bersifat menguntungkan dan dapat diterima oleh masyarakat (Sudirman, 2013:189).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa alat tangkap yang digunakan oleh para nelayan dalam melakukan penangkapan ikan, diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat. Hal itu mestinya diketahui dan disadari oleh seluruh nelayan, khususnya masyarakat nelayan di Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu. Masyarakat nelayan di Kelurahan Kamalapati, tergolong nelayan tangkap. Peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan, pada umumnya masih bersifat sederhana. Namun demikian, pengaruh teknologi nampaknya sudah mulai masuk dan digunakan oleh masyarakat nelayan. Sekarang ini sebagian besar masyarakat nelayan, sudah menggunakan mesin untuk menjalankan atau mengoperasikan perahunya. Dengan demikian, sebagian besar perahu nelayan, sekarang ini telah menggunakan mesin. Perahu yang digunakan oleh masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya ada beberapa jenis, dan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Adapun beberapa jenis perahu yang ada, di antaranya: perahu motor tempel, motor dalam dan kapal motor. Selain perahu, alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai nelayan, juga terus mengalami perkembangan. Adapun alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat nelayan di pesisir Waingapu, khususnya di Kelurahan Kamalapati adalah *gilinet hanyut*, *pukat cincin + lamra*, *pukat cumi/paya*, *bagan perahu*, *pancing*, dan lain-lain.

Lebih lanjut mengenai penggunaan alat-alat tangkap yang digunakan oleh para nelayan, akan dijelaskan dalam uraian berikut.

1. *Pukat cincin + lamra*, alat ini dibuat berbentuk lingkaran, sehingga disebut alat tangkap melingkar,

2. *Pukat cumi/paya*, digunakan dengan cara melepas alat, kemudian secara perlahan-lahan baru ditarik,
3. *Bagan perahu*, alat ini langsung menempel dengan perahu yang digunakan untuk menangkap ikan. Saat menangkap ikan, menggunakan alat penerang (lampu). Penggunaan alat penerang (lampu), adalah untuk memancing atau menarik ikan-ikan supaya datang (mendekati lampu). Setelah ikan-ikan berdatangan, barulah jaring tersebut diangkat, dengan menggunakan alat katrol yang terbuat dari kayu.
4. *Pancing*, alat menangkap ikan yang dinamakan pancing, adalah alat tangkap yang paling dikenal oleh masyarakat. Alat pancing ini menggunakan umpan yang dipasang pada pancing, yang telah diikatkan pada tali pancing. Saat penggunaannya, pancing bersama dengan umpan, dilempar ke dasar sungai atau laut, kemudian beberapa saat setelah pancing dimakan ikan, kemudian pancing ditarik secara perlahan-lahan ke atas.
5. *Jalawaring*, jalawaring adalah alat tangkap ikan dengan menggunakan bagan tancap. Alat ini menggunakan kayu yang ditancapkan di dasar laut, dan di sekeliling kayu dipasang waring.

Lebih lanjut mengenai peralatan yang biasanya digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan, dapat dilihat dalam gambar 3.2, dan 3.3, berikut ini.



Gambar 3.2. Perahu Sebagai Sarana Menangkap Ikan

Sumber: Dokumen Tim Penulis

Berdasarkan gambar 3.2 dapat diketahui bahwa perahu yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan, telah menggunakan teknologi berupa mesin yang dipasang di sebelah kanan bagian belakang. Selain itu dalam menjaga keamanan dan keselamatan nahoda dan ABK (anak buah kapal) dari pengaruh cuaca, perahu telah dilengkapi dengan atap yang terbuat dari terpal plastik. Demikian pula dalam hal pemeliharaan, supaya perahu lebih awet dan tahan lama, telah dilakukan pengecatan yang dilakukan secara rutin, yang dilakukan antara 2 sampai 3 tahun sekali. Perahu yang disandarkan di pinggir pantai diikat dengan tali, supaya tidak dibawa air laut, jika terjadi pasang. Tali tersebut diikatkan pada tanaman atau patok kayu yang ditancapkan di pinggir pantai.



Gambar 3.3. Alat Menangkap Ikan berupa Jaring
Sumber: Dokumen Tim Penulis

Melalui gambar 3.3 dapat dilihat alat jaring yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Jaring tersebut ditaruh dan dijemur pada suatu tempat di pinggir pantai, setelah digunakan untuk menangkap ikan oleh nelayan. Jaring dibersihkan terlebih dahulu dengan menghilangkan bekas-bekas sampah maupun ranting-ranting yang nyangkut pada lobang jaring. Jaring dijemur di pinggir pantai, sebelum digunakan kembali.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa alat-alat tangkap yang digunakan oleh kelompok nelayan di pesisir Waingapu, khususnya di Kelurahan Kamalaputi masih tergolong mempunyai selektivitas yang tinggi, sehingga tidak merusak habitat yang ada di sekitarnya. Untuk menjaga keberlanjutan terkait dengan perikanan tangkap, pemerintah telah melakukan kebijakan-kebijakan, seperti:

1. Larangan penggunaan penangkapan ikan jenis *trawl*. Sk. Dirjen Perikanan Nomor 340 Tahun 1997.
2. Ketentuan tentang ukuran mata jaring, melarang *purse seine* yang menggunakan ukuran mata jaring lebih kecil dari 2 inci pada bagian sayap dan kurang dari 1 inci pada bagian kantong.
3. Pengaturan tentang jalur penangkapan ikan melalui Sk. Menteri Pertanian No. 392/Kpts/IK.120/4/99.
4. Pengaturan pemasangan rumpon.
5. Perlindungan spesies ikan dan biota air. Pelarangan penangkapan beberapa jenis sumberdaya ikan yang sudah dalam kondisi langka atau terancam punah, seperti *trochus* (*Trochus niloticus*), beberapa jenis penyu, kima (*Pinctada sp*), beberapa jenis arwana (*Schleropagus spp.*), dan ikan duyung. SK. Mentan No. 375/Kpts/IK.250/5/1995 tentang Pelanggaran Penangkapan Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulates ruppef*).
6. Penetapan potensi sumber daya ikan dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) (Sudirman, 2013:193).

E. Aktivitas Masyarakat Nelayan di Pesisir Waingapu

Aktivitas yang dilakukan para nelayan, pada umumnya terdiri atas tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya. Demikian pula dengan aktivitas masyarakat nelayan di pesisir Waingapu, khususnya di Kelurahan Kamalapati, Kabupaten Sumba Timur, juga berdasarkan atas tahapan-tahapan yang mesti mereka lakukan. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh para nelayan dalam melaksanakan aktivitasnya, akan dijelaskan dalam uraian berikut.

1. Tahap Persiapan

Sebelum berlayar, para nelayan perlu melakukan persiapan terlebih dahulu, supaya dalam menjalankan aktivitasnya dapat berjalan dengan lancar dan selamat. Persiapan yang paling

penting adalah mengenai persiapan peralatan yang akan dibutuhkan selama berlayar. Selain itu melakukan pengontrolan terhadap kondisi perahu, juga merupakan hal yang penting, sebelum melaksanakan aktivitas. Kondisi perahu yang digunakan menangkap ikan, dipastikan dalam kondisi baik (normal). Peralatan lainnya yang perlu disiapkan sebelum berlayar, di antaranya: umpan, kail, bensin (bahan bakar minyak), makanan dan minuman yang dibutuhkan selama berlayar, lampu atau alat penerang, dan lain-lain. Persiapan peralatan yang dibutuhkan selama berlayar, betul-betul dipersiapkan, sehingga tidak ada yang tertinggal. Apabila ada yang tertinggal, dan baru ingat di tengah perjalanan, biasanya para nelayan pantang untuk kembali ke rumah, kecuali yang dilupakan tersebut adalah alat tangkap seperti *tonda*. Apabila alat tersebut dilupakan, biasanya nelayan kembali ke rumah untuk mengambilnya. Mengingat alat seperti *tonda* adalah alat pokok yang dibutuhkan nelayan saat melaut. Masyarakat nelayan pantang kembali ke rumah apabila ada peralatan yang mereka tinggalkan, karena mereka memiliki keyakinan, bahwa apabila mereka kembali ke rumah, rejekipun akan kembali (tidak mendapatkan hasil dalam berlayar).

2. Tahap Melakukan Aktivitas

Sebelum melakukan aktivitas, hal penting yang perlu mendapat perhatian para nelayan adalah mengenai kondisi cuaca. Apabila keadaan cuaca kurang baik, mereka melakukan penundaan, bahkan pembatalan untuk berlayar. Mereka biasanya menunggu cuaca kembali baik (normal). Apabila mendung di gunung Meja, yaitu gunung yang berada pada arah bagian barat, itu pertanda angin tidak baik. Kondisi tersebut memberi isyarat kepada nelayan untuk menunggu keadaan alam supaya lebih membaik.

Masyarakat dalam menjalankan aktivitas, biasanya dilakukan oleh 1–2 orang, tergantung dari perahu yang digunakan. Saat berlayar, nelayan memfungsikan alat tangkap ikan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Mereka umumnya berlayar untuk menangkap ikan sekitar 200–300 meter dari pesisir, dengan menggunakan alat yang sederhana. Umumnya nelayan berlayar sekitar tiga sampai empat jam, yakni berlayar mulai pukul 3 sore, dan kembali pukul 6 sore. Namun ada pula nelayan yang berlayar lebih dari 10 jam, yaitu mereka berangkat sekitar pukul 6 sore, kemudian kembali keesokan harinya.

Selama berlayar, mereka mentaati semua pantangan-pantangan yang wajib untuk ditaati. Pantangan-pantangan tersebut, antara lain: apabila saat berlayar mereka menemukan kejadian-kejadian aneh, seperti bayangan kapal, yang dikenal dengan istilah *mahori*, nelayan sebaiknya diam, dan tidak menunjuknya. Demikian pula apabila menemukan ikan gurita besar, tidak boleh ditegur, sebaiknya diam, dan membiarkan hal-hal aneh tersebut berlalu. Setelah lewat (hilang) barulah melanjutkan aktivitas. Keyakinan masyarakat terhadap hal-hal yang bersifat gaib tersebut, masih diyakini sampai sekarang. Bahkan masyarakat yang bertempat tinggal di Tanjung Sesar, sampai sekarang masih menjalankan upacara-upacara yang bersifat tradisional, terkait dengan kehidupan masyarakat nelayan. Berdasarkan penuturan masyarakat, daerah ini dinamakan Tanjung Sesar, karena konon para leluhur mereka berasal dari Makasar. Para leluhur mereka berlayar dari Makasar dan berlayar sampai menuju daerah itu, kemudian mereka '*kesasar*'. Oleh sebab itulah daerah tersebut sampai sekarang dinamakan Tanjung Sesar. Wilayah Tanjung Sesar diyakini oleh masyarakat sebagai tempat yang keramat. Oleh karena itu, di tempat tersebut, digunakan oleh masyarakat sebagai

tempat memohon berkah, seperti mohon hujan, serta memohon hasil tangkapan ikan supaya bertambah. Di samping itu, di Tanjung Sasar terdapat kuburan keramat, dan kuburan tersebut merupakan kuburan nenek moyang mereka yang merupakan cikal bakal (orang pertama) yang datang ke wilayah Sumba Timur. Kehidupan masyarakat sebagai nelayan sampai sekarang masih bertahan dalam kehidupan masyarakat di pesisir Waingapu, khususnya di Kelurahan Kamalapati, yang dapat dilihat melalui gambar 3.4.



Gambar 3.4 Aktivitas Nelayan di Pesisir Waingapu

Sumber: Dokumen Tim Penulis

Melalui gambar 3.4 dapat diketahui bahwa masyarakat nelayan sedang menyandarkan perahunya di tepi pantai, setelah mereka melakukan aktivitas menangkap ikan. Kondisi air laut yang tenang sangat cocok untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan. Selain

itu sangat cocok pula sebagai tempat rekreasi. Dengan kondisi air laut yang tenang, serta jumlah perahu cukup banyak, dapat dioptimalkan pemanfaatannya oleh para nelayan untuk menarik minat para pengunjung yang datang ke pantai untuk menikmati keindahan pesisir Waingapu, yaitu dengan menyewa perahu. Hal tersebut dapat menambah penghasilan para nelayan, dan memanfaatkan waktu senggang atau istirahat mereka.

Khusus dalam hal penangkapan ikan, masyarakat nelayan memiliki pengetahuan terkait dengan aktivitas yang mereka lakukan. Pengetahuan yang dimaksud adalah mengenai musim keberadaan ikan, dan cuaca (kondisi alam). Berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya, mereka dapat menentukan langkah-langkah yang mesti dilakukan sesuai dengan cuaca dan kondisi alam pada saat itu. Seperti misalnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan ikan, di mana bulan April merupakan musim ikan tongkol. Apabila musimnya bagus, musim ikan tongkol bisa berlangsung hingga tujuh sampai delapan bulan. Namun tidak selamanya berlangsung dalam waktu lama, bisa juga berlangsung hanya dua sampai tiga bulan saja.

Musim ikan tongkol ditandai dengan munculnya ikan-ikan kecil ke permukaan air laut. Pengetahuan masyarakat tentang keberadaan ikan atau musim ikan, juga dapat diketahui berdasarkan arah angin. Pada musim angin tenggara, angin utara, dan angin timur laut adalah musim ikan. Salah satu ikan yang banyak muncul ke permukaan adalah ikan cucut. Sedangkan pada musim angin selatan dan angin barat daya, adalah keadaan angin tidak menentu, serta pada saat musim angin ini, sering terjadi angin kencang dan gelombang tinggi. Dengan demikian pada saat musim angin selatan dan angin barat daya merupakan masa paceklik, karena para nelayan banyak yang tidak berani melaut.

3. Aktivitas Sesudah Berlayar

Aktivitas yang dilakukan para nelayan, setelah melakukan penangkapan ikan, adalah memasarkan hasil tangkapan ikan. Hasil tangkapan ikan yang mereka peroleh tidak begitu banyak, hal tersebut dikarenakan oleh penggunaan alat tangkap yang sifatnya masih sederhana, serta aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan dalam waktu yang tidak begitu lama. Hasil tangkapan ikan oleh para nelayan umumnya dijual kepada tengkulak, atau dijual sendiri ke pasar-pasar tradisional terdekat. Apabila mereka menjualnya kepada tengkulak, sudah tentu harganya lebih murah, karena tengkulak nantinya akan menyalurkan lagi ke konsumen atau pasar-pasar ikan. Setelah ikan terjual, nelayan kembali mempersiapkan berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan penangkapan di hari atau waktu berikutnya. Apabila cuaca kurang mendukung, seperti mendung dan angin kencang, mereka membatalkannya untuk berlayar, serta menunggu cuaca membaik. Masyarakat nelayan dalam mengisi waktu luang, atau selama tidak melaut, ada sebagian yang bekerja pada sektor-sektor kerja yang lain, seperti kerja pada proyek bangunan, berjualan, membuat garam, dan lain-lain.

F. Sistem Distribusi Hasil Tangkapan Ikan

Seperti telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya, bahwa hasil tangkapan ikan, dipasarkan kepada tengkulak, dan ada pula yang dipasarkan ke pasar-pasar terdekat. Masyarakat menjualnya langsung ke pasar terdekat, mengingat belum ada lembaga atau wadah yang dapat menampung hasil-hasil tangkapan ikan. Setelah terjual, para nelayan yang mengemudikan perahunya sendiri, langsung dapat menentukan keuntungan atau hasil pendapatan mereka. Hasil penjualan ikan dikurangi biaya operasional seperti

bahan bakar minyak, buruh atau tenaga angkut hasil tangkapan ikan dan lain-lain. Setelah pengurangan biaya-biaya, barulah dapat ditentukan pendapatan bersih yang didapat oleh nelayan. Sedangkan nelayan yang mengemudikan perahu milik orang lain, mereka akan membagi hasil tangkapan ikan yang mereka dapat, dengan aturan-aturan yang telah disepakati sebelumnya dengan pemilik perahu. Perahu-perahu besar dengan ABK (anak buah kapal) lebih dari lima orang, biasanya menggunakan sistem *semi prosen* dalam membagi hasil tangkapan ikan. Cara pembagian dengan cara *semi prosen* di sini adalah terlebih dahulu hasil penjualan yang didapat selama melaut dipotong dahulu biaya oprasionalnya. Setelah dipotong biaya-biaya, barulah sisanya dibagi menjadi 2, yakni: 50% untuk pemilik perahu, dan 50% untuk ABK (anak buah kapal). Jumlah 50% untuk ABK (anak buah kapal), dibagi secara sama rata oleh anak buah kapal. Sedangkan khusus untuk pimpinan (juragan), mendapatkan 10% lagi dari pembagian pemilik perahu. Jadi pembagian 50 % yang tadinya diberikan untuk pemilik perahu, diberi pimpinan (juragan), sebanyak 10%.

Di samping pembagian dengan cara *semi prosen*, ada pula pembagian hasilnya dengan cara yang lain. Umumnya cara pembagian ini berlaku pada perahu-perahu kecil (*katinting*). Sistem pembagian hasil pada perahu-perahu kecil, yaitu hasil tangkapan ikan yang didapat, terlebih dahulu diperhitungkan biaya oprasionalnya. Setelah diperoleh penghasilan bersih, barulah hasilnya di bagi menjadi 3 bagian, yaitu pemilik perahu mendapat 1 bagian, untuk perahu (perawatan dan pemeliharaan) 1 bagian, dan ABK perahu 1 bagian. Pembagian hasil dengan membagi hasil menjadi 3 bagian ini, dalam praktiknya di masyarakat, sering kali dirubah menjadi 2 bagian, yaitu 1 bagian untuk pemilik perahu, dan satu bagian lagi untuk ABK (anak buah kapal). Biaya

oprasional biasanya ditanggung oleh pemilik perahu. Pembagian hasil menjadi 2 bagian ini, biasanya berlaku bagi mereka yang memiliki hubungan dekat secara kekeluargaan, seperti sepupu, ipar, menantu, mertua dan lain-lain.

G. Pantangan dan Kepercayaan Masyarakat Nelayan di Pesisir Waingapu

Selain pantangan-pantangan yang telah dijelaskan sebelumnya, pantangan-pantangan yang lain terkait dengan aktivitas nelayan, yaitu pantangan untuk tidak melaut, jika ada kematian yang menimpa salah satu warga masyarakat kampung Bugis. Para nelayan yang mengetahui terjadi musibah (kematian), yang menimpa salah seorang warga masyarakat, biasanya mereka membatalkan aktivitasnya untuk menangkap ikan. Berdasarkan penuturan masyarakat, mereka memiliki keyakinan bahwa, apabila aktivitas menangkap ikan dilakukan, saat terjadi musibah (kematian), dan hal itu dilanggar oleh para nelayan, mereka akan mengalami gangguan atau halangan dalam menjalankan aktivitas, seperti terjadi kerusakan pada mesin maupun pukat yang digunakan sebagai sarana untuk menangkap ikan.

Selain pantangan-pantangan, masyarakat nelayan juga memiliki kepercayaan yang dikenal dengan istilah *marapu*. Tradisi ini berperan besar dalam meningkatkan keyakinan masyarakat, terutama dalam menjalankan aktivitasnya sebagai nelayan. *Tradisi marapu* adalah melakukan persembahyangan terkait dengan aktivitas nelayan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat nelayan, bertujuan untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa, supaya ikan-ikan yang berada di dasar laut, naik ke permukaan. Pada saat menjalankan *tradisi marapu*, pemimpin atau pelaksana upacara biasanya mengucapkan mantra yang dinamakan mantra *batu*

hitam. Dinamakan dengan mantra *batu hitam*, adalah untuk lebih mengenang leluhur mereka. Berdasarkan penuturan masyarakat, mengatakan bahwa dahulunya leluhur mereka berasal dari Makkah dan Madinah. Selain itu masyarakat juga memiliki suatu kepercayaan bahwa di tengah laut terdapat penguasa laut, yang sewaktu-waktu akan menampakkan dirinya. Penguasa laut yang diyakini masyarakat, dapat berupa perahu besar, gurita raksasa, maupun api yang menyala pada malam hari yang datanginya dari langit, kemudian api itu jatuh di permukaan laut. Apabila nelayan menemukan hal-hal yang bersifat gaib tersebut, sebaiknya diam, tidak menunjuk dan menegur. Apabila hal tersebut dilanggar, nelayan maupun perahu yang dikemudikan, biasanya seringkali mendapat gangguan atau bahaya.

Selain itu, masyarakat Kabupaten Sumba Timur juga mempunyai kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus (roh-roh). Masyarakat Sumba percaya akan adanya makhluk-makhluk halus yang dapat diminta pertolongannya, tetapi dapat pula mencelakakan manusia. Roh halus tersebut terdapat di mana-mana atau mendiami tempat-tempat tertentu. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Sumba, terdapat bermacam-macam roh halus, beberapa di antaranya adalah:

1. Roh tanah (*maraba tana*)

Roh ini mempunyai tempat tertentu. Ia dianggap suka menolong orang yang berburu ke hutan atau menangkap ikan di laut, jika orang tersebut memberikan persembahan kepadanya. Pada waktu seseorang membuka ladang baru, roh tanah ini harus dipindahkan ke tempat lain dengan upacara keagamaan.

2. Roh sahabat berjalan (*yora pangga-yora*)

Roh ini adalah roh yang menemani seseorang dalam perjalanan. Jika kepadanya diberi persembahan, ia akan menemani

seseorang dalam perjalanan, sehingga tujuan perjalanannya berhasil, seperti pergi berburu, berdagang, dan menangkap ikan.

Berdasarkan kepercayaan yang telah dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa masyarakat Sumba pada umumnya dan masyarakat Sumba Timur khususnya, mempunyai kepercayaan-kepercayaan, yang terkait dengan aktivitas yang mereka lakukan. Khusus bagi masyarakat nelayan, kepercayaan-kepercayaan tersebut di atas, mereka yakini dan taati dalam melaksanakan aktivitasnya. Selain itu masyarakat Sumba Timur percaya pula kepada makhluk-makhluk halus (roh-roh) yang lainnya seperti: roh sahabat berjalan ke alam gaib (*Yora Patuna*), roh *suanggi* (*wandi mamarungu*), roh penipu (*wandi kambaliku*), roh jahat (*wandi akatu*), dan roh perut (*wandi kambu*) (Wellem, 2004:47).

H. Potensi dan Kendala yang Dihadapi Kelompok Nelayan

Tahir (2013:110), mengatakan bahwa laut memiliki manfaat yang sangat besar bagi kemaslahatan umat manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat laut menurutnya, antara lain:

1. Laut menghasilkan pangan yang terdiri atas berbagai jenis ikan pelagis besar (tuna, cakalang, tenggiri, ikan pelagis kecil (kembung, layang, sardine, ikan demersal (kerapu kakap), *crutacea* (udang, kepiting), moluska (cumi,cumi, gurita), rumput laut, *fitoplankton* (*Clorella*, *chaetoceros*), dan lain sebagainya. Di samping itu, air laut dapat diolah untuk menghasilkan air tawar, terutama untuk memenuhi kebutuhan wilayah yang sumber daya air tawarnya terbatas.
2. Laut mengandung berbagai macam mineral seperti natrium klorida, magnesium klorida, dan potassium klorida. Selain

itu juga mengandung bahan-bahan tambang dari dasar laut, seperti *nodule mangan*, *nodule fosfor*, *ooze globigerina*, *ooze diatomaceous*, *red clay*, minyak bumi, dan gas alam.

3. Laut mengandung perhiasan yang indah. Perhiasan dalam arti yang lebih luas berarti laut dijadikan sebagai pariwisata termasuk pemandangan bawah laut, keindahan taman-taman laut, keelokan terumbu karang, padang lamun, serta olah raga wisata seperti menyelam, selancar air, selancar angin, renang dan ski air.
4. Laut adalah jalan raya utama untuk bahtera berlayar. Perhubungan laut yang menghubungkan antarpulau, antarnegara, dan antarbenua menjadikan laut sebagai media transportasi utama yang memegang peranan dalam perekonomian suatu negara.
5. Laut juga memiliki sumber daya energi terbarukan seperti energi pasang surut, energi gelombang, energi termal yang dapat menghasilkan energi listrik untuk kemaslahatan umat manusia. Di samping itu, laut juga terkait pada pertahanan keamanan suatu negara.

Seperti telah diuraikan di atas, laut memiliki potensi dan manfaat cukup besar untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, laut perlu dijaga dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak mengalami pengrusakan. Meski pemerintah dan masyarakat telah berupaya dan berusaha untuk menjaga wilayah laut, namun masih tetap saja ada permasalahan yang membutuhkan pemecahan. Adapun permasalahan yang dimaksud yaitu berupa permasalahan sosial, dan menurunnya stok sumber daya ikan. Permasalahan sosial yang timbul yaitu terjadinya konflik sosial, yang timbul akibat kompetisi besar-besaran dalam memperebutkan ikan, yang

menjadi tujuan penangkapan, ataupun kerusakan lingkungan serta punahnya beberapa spesies ikan yang diakibatkannya, telah menunjukkan indikator yang sangat memperingatkan bagi kelangsungan hidup bagi generasi mendatang.

Sehubungan dengan uraian di atas, kelompok nelayan di pesisir Waingapu, khususnya di Kelurahan Kamalapati, juga memiliki berbagai potensi dan kendala dalam menjalankan aktivitasnya sebagai nelayan. Mengenai potensi dan kendala yang dihadapi kelompok nelayan di Kelurahan Kamalapati, akan dijelaskan dalam uraian berikut.

1. Potensi

Keberadaan mengenai laut, belakangan ini telah banyak dikemukakan para ahli, seperti penganut paham determinisme lingkungan, mengatakan laut adalah pembentuk kebudayaan. Namun bagi penganut ekologi budaya, laut hanya akan mempengaruhi sebagian unsur kebudayaan saja, yaitu kependudukan dan organisasi sosial, sistem ekonomi, sistem pengetahuan, serta teknologi. Oleh antropolog Julian Steward, unsur-unsur inilah yang disebut inti kebudayaan. Dalam inti kebudayaan inilah berlangsung interaksi antara kebudayaan dan lingkungan hidup di sekitarnya.

Interaksi antara kebudayaan dengan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya, khususnya dalam kehidupan masyarakat pesisir, dapat diketahui berdasarkan catatan sejarah. Pada zaman Sriwijaya misalnya, di mana kejayaan sebagai bangsa bahari pernah terwujud, kebudayaan bahari setidaknya dicirikan dengan kuatnya pertahanan laut, masyarakat kosmopolit yang terbuka dan pemberani, ekonomi perdagangan berbasis laut, memiliki pengetahuan dan ketrampilan pelayaran, serta menguasai

teknologi perkapalan (*Kompas* 9 Juni 2014, hlm. 7, kolom 4). Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, melakukan berbagai upaya untuk dapat mempertahankan hidupnya, serta mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia memanfaatkan dan mengolah lingkungan alam yang ada di sekelilingnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manusia dengan lingkungan alam, memiliki hubungan yang bersifat timbal-balik.

Lebih lanjut Pramudya Sunu (2001, dalam Susilo, 2009:31), membahas hubungan manusia dengan lingkungan, terutama mengenai dampak yang ditimbulkannya. Berdasarkan pandangan yang dikemukakannya, mengatakan bahwa terdapat dua jenis bencana akibat rusaknya daya dukung lingkungan. Pertama, kerusakan karena faktor internal, yakni kerusakan yang berasal dari alam sendiri. Bagi masyarakat, kerusakan ini sukar dihindari sebab merupakan bagian dari proses alam. Tidak sedikit kejadiannya dalam waktu singkat, tetapi dampak atau akibat yang diterima dalam waktu lama. Oleh sebab itu, yang bisa dilakukan adalah menyiagakan diri atau mempersiapkan manajemen bencana guna meminimalkan banyak bencana. Faktor internal sebagai penyebab kerusakan lingkungan, akan sesuai jika dijelaskan dengan teori determinisme lingkungan. Dalam teori determinisme lingkungan dijelaskan bahwa seluruh aspek budaya, perilaku bahkan nasib manusia dipengaruhi, ditentukan, dan tunduk pada lingkungan. Kedua, kerusakan karena faktor eksternal, yaitu kerusakan yang terjadi karena perilaku manusia. Terutama beralasan demi meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup. Kerusakan daya dukung sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan seperti: industrialisasi, dan pembuangan limbah rumah tangga ke sungai, dan lain-lain.

Sehubungan dengan uraian di atas, mengingat pentingnya faktor lingkungan bagi kehidupan manusia, serta flora dan fauna yang ada di sekitarnya, maka faktor lingkungan perlu diperhatikan secara lebih serius. Dengan demikian akan dapat lebih bermakna bagi kehidupan masyarakat, dengan mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Hal tersebut telah dilakukan oleh masyarakat nelayan yang tinggal di pesisir Waingapu, khususnya yang berada di Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Sumba Timur. Masyarakat nelayan di sana telah memanfaatkan potensi sumber daya alam khususnya wilayah pesisir, seperti: membuat garam yang masih dilakukan secara tradisional, melakukan penangkapan ikan (sebagai nelayan) dan lain-lain. Mata pencaharian sebagai nelayan telah dilakukan sejak zaman dahulu, dan masih tetap dilakukan sampai sekarang.

Masyarakat nelayan di pesisir Waingapu, khususnya masyarakat nelayan di Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Sumba Timur memiliki potensi terkait dengan aktivitasnya sebagai nelayan. Kabupaten Sumba Timur memiliki kekayaan laut hingga sejauh 4 mil dari pantai dan masih membutuhkan pengembangan, baik hasil ikan maupun non ikan. Komoditi potensial yang telah dipanen antara lain ikan tuna, marliyn biru, cumi-cumi, teripang dan lain-lain. Dalam usaha meningkatkan potensi sumber daya laut yang dimiliki Kabupaten Sumba Timur, masih dibutuhkan kerja keras, teknologi dan modal, terutama untuk budidaya rumput laut, mutiara, perolehan *abalone*, dan hasil laut lain beserta pengolahannya (Anggraeni dkk, 2005:31). Sedangkan khusus untuk masyarakat nelayan yang berada di Kelurahan Kamalapati, mempunyai beberapa potensi yang dapat dikembangkan, di antaranya potensi alam, sosial maupun budaya. Dipandang dari potensi alam, pesisir

Kelurahan Kamalapati, memiliki panjang pantai sepanjang 2 km, dan sangat potensial untuk mengembangkan usaha bidang perikanan. Pada zaman dahulu masyarakat pesisir di Kelurahan Kamalapati mempunyai dua penghasilan utama yang menonjol, yaitu berupa hasil tangkapan ikan laut dan kelapa. Masyarakat kampung Bugis dengan mata pencahariannya sebagai nelayan, menghasilkan ikan, sedangkan masyarakat asli yang tinggal di Kampung Kamalapati menghasilkan kelapa. Masyarakat nelayan di Kelurahan Kamalapati yang mata pencahariannya sebagai nelayan berjumlah 254 orang. Upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan pelestarian lingkungan adalah: (a) melakukan pelarangan untuk menggunakan alat-alat menangkap ikan yang dapat merusak lingkungan; (b) mengadakan kerja sama dengan instansi terkait dalam menjaga kelestarian lingkungan; (c) melakukan penanaman pohon bakau, dengan bantuan bibit dari pihak pemerintah; (d) membuat bangunan penahan air laut untuk mencegah terjadinya abrasi.

Selain potensi yang telah dijelaskan tadi, wilayah pesisir Kabupaten Sumba Timur, juga memiliki lokasi yang sangat potensial untuk mengembangkan ekosistem *mangrove*. Indonesia memiliki potensi dan luasan ekosistem *mangrove* yang cukup besar. Dari sekitar 15.900.000 ha ekosistem *mangrove* yang terdapat di dunia, sekitar 27% atau 4.239.000 ha berada di Indonesia. Ekosistem *mangrove* memiliki peran dalam meningkatkan potensi sumber daya perikanan pesisir dan laut secara berkelanjutan. Fungsi dan manfaat ekosistem *mangrove* dapat digeneralisasi menjadi empat hal penting: (a). secara fisik dapat melindungi lingkungan dari pengaruh oseanografi (pasang surut, arus, angin topan, dan gelombang), mengendalikan abrasi dan mencegah intrusi air laut; (b). secara *bio-ekologi*, sangat berkaitan dengan

sumberdaya perikanan, yaitu sebagai daerah asuhan (*nursery ground*), daerah mencari makan (*feeding ground*), dan daerah pemijahan (*spawning ground*) dari beberapa jenis ikan, udang, dan merupakan penyuplai unsur-unsur hara utama di pantai khususnya pada ekosistem lamun dan terumbu karang; (c). secara ekonomis, sebagai sumber kayu kelas satu, bubur kayu, bahan kertas, *chips*, arang, dan ekowisata, sehingga secara ekologis dan ekonomis dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; (d). Fungsi dan manfaat secara kimia yaitu dengan mengakumulasi dan menetralsisir bahan pencemar yang larut dalam air maupun sedimen seperti Pb, Fe, Cu; merupakan tempat terjadinya siklus biogeokimia berbagai unsur hara, selain itu pohon *mangrove* dapat menghasilkan alkohol, gula, dan minyak goreng (Saru, 2013:64).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, melakukan berbagai upaya untuk dapat mempertahankan hidupnya, serta mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia memanfaatkan dan mengolah lingkungan alam yang ada di sekitarnya.

2. Kendala

Kabupaten Sumba Timur secara umum menghadapi berbagai permasalahan, terkait dengan pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Permasalahan yang dihadapi yakni: seputar kemiskinan dan pengangguran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kurangnya kemampuan kelembagaan pemerintah daerah. Memperhatikan permasalahan utama Kabupaten Sumba Timur dalam upaya untuk mewujudkan visi atau cita-cita yang hendak

dicapainya, maka disusunlah empat program utama yang disebut Catur Program Generasi ke II Pembangunan Sumba Timur sebagai berikut: (a) program peningkatan pendapatan masyarakat; (b) program peningkatan kualitas sumber daya manusia; (c) program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan (d) program peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintah daerah.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, untuk mengimplementasikan catur program ini, ditetapkan empat sektor prioritas, yaitu; (a) pembangunan sektor pertanian dan pedesaan; (b) pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan; (c) pengembangan sektor usaha mikro, kecil dan menengah; (d) revitalisasi kelembagaan pemerintah daerah (Anggraeni, 2005:21). Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Sumba Timur, seperti yang telah dijelaskan tadi, memiliki keterkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh kelompok nelayan, dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai nelayan. Adapun kendala yang dimaksud, di antaranya berupa kendala alam dan kendala sosial. Kendala alam telah banyak dijelaskan dalam uraian sebelumnya, yaitu berupa keadaan alam dan cuaca. Sedangkan kendala sosialnya, yaitu masih adanya warga masyarakat nelayan yang belum menyadari pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih adanya beberapa orang nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potassium. Potassium adalah salah satu alat peledak untuk menangkap ikan. Kendala lain yang dihadapi oleh kelompok nelayan, khususnya yang berada di Kelurahan Kamalapati, adalah mengenai persediaan sarana dan prasarana, khususnya dalam bidang peralatan. Sementara ini peralatan yang digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan masih sangat sederhana.

Seperti apa yang telah dituturkan oleh Lurah Kamalapati, yang menuturkan berbagai pengalaman yang dialami masyarakat nelayan diwilayahnya, yaitu apabila ada salah seorang nelayan Kamalapati menemukan salah seorang nelayan luar masuk ke wilayah pantainya, dengan menggunakan alat-alat penangkapan ikan berupa potassium atau sejenis alat-alat yang lainnya yang dapat mengganggu lingkungan, maka nelayan yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk melakukan penangkapan. Mengingat nelayan luar menggunakan perahu mesin yang lebih canggih dan modern, sehingga mereka dapat dengan cepat untuk melarikan diri. Selain keterbatasan dalam bidang sarana dan prasarana, juga belum optimalnya pengawasan wilayah laut kita yang begitu luas. Dua pertiga wilayah Indonesia yang terdiri atas lautan, merupakan salah satu fakta, luas wilayah Indonesia didominasi oleh laut.

Meski luas wilayah laut Indonesia cukup luas, namun kita belum mampu secara optimal menguasai wilayah laut kita sendiri. Sementara ini, beberapa kapal ikan asing begitu liar masuk ke wilayah perairan Indonesia, dan hal itu nyaris tidak tersentuh. Penyelundupan di mana-mana, kekuatan pertahanan lemah, dan belum maksimalnya pemanfaatan potensi ekonomi kelautan. Padahal menguasai laut adalah kunci kedaulatan, dan kedaulatan adalah cita-cita proklamasi. Di samping kendala yang telah disebutkan di atas, masyarakat nelayan di pesisir Waingapu menghadapi kendala dalam bidang persediaan bahan bakar minyak (bensin). Sementara ini para nelayan mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (bensin), dan harganya cukup tinggi. Apalagi untuk mendapatkan bahan bakar minyak yang bersubsidi. Saat ini masih banyak nelayan kecil yang tidak bisa mengakses jatah BBM bersubsidi. Padahal BBM merupakan kebutuhan dasar melaut dengan biaya mencapai 60–70% dari

total biaya melaut. “Pemotongan BBM bersubsidi untuk nelayan harus dijaga agar jatah benar-benar tersalurkan. Karena itu, butuh pengawasan distribusinya,” kata Sharif saat pembagian sembako untuk nelayan di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (8/8), (*Kompas*, 9 Agustus 2014). Kendala atau hambatan bahan bakar minyak (BBM), juga dialami oleh kelompok nelayan yang tinggal di pesisir Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kios-kios atau warung yang menyediakan bahan bakar minyak untuk kebutuhan para nelayan. Untuk mengatasi hal tersebut, tokoh masyarakat menyampaikan ide-ide atau gagasannya untuk membentuk koperasi, yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat nelayan, khususnya persediaan mengenai bahan bakar minyak (BBM).

Dalam upaya meningkatkan ketahanan dalam bidang kelautan, dan mengembalikan kebudayaan bahari harus melalui revolusi dan tidak bisa dengan cara-cara biasa. Revolusi adalah perubahan menyangkut sendi-sendi kehidupan. Adapun dimensi revolusi kebudayaan bahari, meliputi: *Pertama*, revolusi cara pandang, yakni perubahan cara pandang bahwa laut adalah halaman terdepan dan wilayah kedaulatan yang harus dijaga secara maksimal, baik secara ekologis, ekonomis, maupun geopolitik. Hasil revolusi cara pandang adalah kesadaran kolektif dan kesadaran politik yang berarti mewujudkan pada gerakan aksi yang memberikan dampak perubahan secara sistemik. *Kedua*, revolusi ekonomi, yakni mewujudkan laut sebagai sumber kemakmuran bangsa dan kesejahteraan rakyat yang harus dikelola secara lestari dan adil. Untuk perikanan saja potensinya mencapai 78,1 milyar dollar AS, hal itu mestinya bisa membuat nelayan sejahtera. Belum untuk industri kemaritiman, farmasi, energi, wisata bahari, dan jasa kelautan lainnya. Perlu strategi besar

yang jelas dan terukur untuk mewujudkan revolusi ini. *Ketiga*, revolusi iptek dan kelautan, yakni memperkaya sistem pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan pengetahuan publik tentang kelautan, serta menghasilkan riset-riset unggulan yang menjadi sumber kemandirian iptek kelautan. Jangan sampai laut kita terus-menerus menjadi objek penelitian asing yang membuat peneliti asing lebih tahu laut kita daripada kita sendiri. *Keempat*, revolusi kelembagaan, yakni menciptakan tata aturan yang jelas dalam pengelolaan dan pemanfaatan, laut serta organisasi pengelola kelautan yang lebih efisien. Sebagai contoh ada 12 kementerian dan lembaga yang bergerak dalam pengawasan di laut, hal itu tentu menimbulkan tumpang tindih. Kelembagaan rakyat pun harus terintegrasi dalam pengelolaan laut ini (*Kompas* 2014, halaman 7, kolom 4).

Revolusi kebudayaan bahari bukanlah upaya meniadakan pembangunann di darat, melainkan lebih pada mengisi kekosongan yang sudah lama dibiarkan. Dengan demikian revolusi kebudayaan bahari adalah upaya menciptakan keseimbangan keduanya, baik darat maupun laut.

BAB IV

PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT NELAYAN DI PESISIR WAINGAPU SUMBA TIMUR

A. Menuju Masyarakat Nelayan Modern

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau yang dikenal dengan sebutan Nusantara sebagian besar adalah laut, dapat diartikan sebagai “negara laut utama” yang ditaburi dengan pulau-pulau, bukan negara pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut. Dengan demikian paradigma perihal negara kita seharusnya terbalik, yakni negara laut yang ada pulau-pulaunya (Lapian, 2009:2). Sejarah kejayaan Nusantara tidak bisa dilepaskan dari sejarah bahari, karena sejak abad ke-5, jauh sebelum kedatangan orang-orang Eropa di perairan Nusantara, pelaut-pelaut negeri ini telah menguasai laut internasional dan tampil sebagai penjelajah samudra. Kronik Cina serta risalah-risalah musafir Arab dan Persia menorehkan catatan agung tentang tradisi besar kelautan nenek moyang bangsa Indonesia). Bahkan sejarah kejayaan Sriwijaya dan Majapahit dalam upaya menyatukan Nusantara, tidak lepas dari kekuatan pelaut dan armada bahari yang dimiliki saat itu. Membicarakan tentang bahari atau laut, pikiran kita tidak terlepas

dari sosok nelayan, berbeda konteks, nelayan dulu adalah sosok terpendang, memiliki identitas sebagai mereka yang tangguh, dan dihormati karena keberhasilannya, namun untuk konteks saat ini, nelayan identik dengan sekelompok masyarakat yang kurang kesejahteraan, tinggal di wilayah pesisir atau pinggiran pantai yang kumuh, yang sulit untuk bisa naik kelas menjadi masyarakat sejahtera dan terpinggirkan.

Kondisi lain yang turut berkontribusi memperburuk tingkat kesejahteraan nelayan adalah mengenai kebiasaan atau pola hidup. Tidak pantas jika kita menyebutkan nelayan pemalas, karena jika dilihat dari daur hidup nelayan yang selalu bekerja keras. Namun kendalanya adalah pola hidup konsumtif, di mana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder. Namun ketika paceklik, pada akhirnya berhutang, termasuk kepada lintah darat, yang justru semakin memperberat kondisi. Deskripsi di atas merupakan puseran masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan umumnya di Indonesia. Secara umum, kurang sejahteranya masyarakat pesisir disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, infrastruktur. Di samping itu, kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup yang cenderung boros, menyebabkan posisi tawar masyarakat tersebut semakin lemah. Pada saat yang sama, kebijakan pemerintah selama ini kurang berpihak pada masyarakat pesisir sebagai salah satu pemangku kepentingan di wilayah pesisir.

Hal tersebut juga terjadi pada masyarakat nelayan di pesisir Waingapu Kabupaten Sumba Timur, dalam hal ini penulis berfokus

pada wilayah pesisir Kelurahan Kamalapati yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai nelayan.

Penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan sejumlah 254 jiwa, umumnya mereka menjadi nelayan yang masih tradisional. Mereka menjadi nelayan tangkap dengan pola tangkap yang sederhana, alat yang dipakai antara lain pancing rawe, pukot cincin dan sebagainya. Menurut data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumba Timur alat tangkap didominasi oleh jaring insang (*gillnet*) sebesar 48,97% disusul alat tangkap pancing sebesar 25,47%, dan alat tangkap lainnya 24,75%. Jumlah alat tangkap semuanya yang terdata yaitu 10.441 unit. Di samping itu juga digunakan jaring tonda dengan menggunakan perahu mesin.



Gambar 4.1. "Pukot cincin" salah satu alat tangkap yang digunakan oleh nelayandi pesisir Waingapu

Sumber: Dokumen Tim Penulis

dan sumber daya ikan *demersal* (kerapu, hiu, serta berbagai jenis ikan karang, udang, cumi, dan lain-lain). Penyebaran ikan *pelangis* dan *demersal* hamper di seluruh perairan pantai terutama di wilayah pantai utara (Tanjung Sasar, Tanjung Batu, Modu, Kayuri, Rende, Tapil, Nusa Maukawini, Hanggaroru, Benda, dan Kalala) dan pantai selatan (Tarimbang dan Salura).

Mereka perlu bantuan dan binaan sehingga menjadi nelayan yang modern. Modernisasi adalah proses pembaharuan masyarakat tradisional (konvensional) menuju masyarakat yang lebih maju dengan mengacu kepada nilai-nilai modernitas yang bersifat universal tersebut. Modernisasi sebagai upaya pembaharuan dalam kehidupan suatu bangsa biasanya tumbuh sebagai akibat dari dua penyebab utama. *pertama*, perubahan tentang hidup dan kehidupan sebagai akibat peningkatan kecerdasan. *Kedua*, keterikatan dan ketergantungan umat manusia secara universal, baik secara ekonomis maupun sosial budaya. Modernisasi pada hakekatnya merupakan serangkaian perubahan nilai-nilai dasar yang berupa nilai teori, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai kuasa (politik), nilai estetika, dan nilai agama. Sehubungan dengan hal tersebut, lebih lanjut ia juga mengungkapkan bahwa untuk dapat mengubah orientasi nilai budaya suatu masyarakat, dibutuhkan cara-cara untuk menopang pendidikan yang diberikan, yakni: (1) pemberian contoh yang benar; (2) mengadakan sistem perangsang yang sesuai; (3) persuasi dan kampanye; (4) pembinaan dan pengasuhan terhadap generasi baru yang dilakukan secara dini dalam lingkungan keluarga.

Masyarakat nelayan ini pada umumnya belum banyak tersentuh teknologi modern, kualitas sumber daya manusia rendah dan tingkat produktivitas hasil tangkapannya juga sangat rendah. Tingkat pendidikan nelayan berbanding lurus dengan teknologi

yang dapat dihasilkan oleh para nelayan, dalam hal ini teknologi di bidang penangkapan dan pengawetan ikan. Ikan cepat mengalami proses pembusukan dibandingkan dengan bahan makanan lain disebabkan oleh bakteri dan perubahan kimiawi pada ikan. Oleh karena itu, diperlukan teknologi pengawetan ikan yang baik. Selama ini, nelayan hanya menggunakan cara yang tradisional untuk mengawetkan ikan. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan penguasaan nelayan terhadap teknologi.

Dukungan pemerintah dan pihak lain sangat dibutuhkan, karena kelemahan utama nelayan Indonesia di banding nelayan bangsa lain adalah masalah pemanfaatan teknologi, akses informasi mengenai titik-titik keberadaan ikan tidak dimiliki oleh nelayan, sehingga jumlah tangkapan nelayan selalu terbatas. Nelayan perlu diedukasi untuk mampu memahami sistem teknologi satelit atau GPS (*global positioning system*), setidaknya walaupun tidak mampu menggunakan teknologinya, nelayan dibukakan akses informasinya, baik dari pihak DKP, BMG maupun syahbandar, sebagai pengelola kegiatan nelayan di tingkat lokal. Selain itu dalam peningkatan kualitas ikan, dukungan dari pengusaha atau pihak akademik mengenai teknologi pengawetan, pengemasan harus diberikan, agar harga ikan yang nelayan jual tidak mengalami kejatuhan.

Dukungan akan peningkatan pendidikan tidak semata kepada nelayan sebagai kepala keluarga, melainkan nelayan dalam konteks keluarga. Keterbatasan pengetahuan terkadang terjadi karena sifatnya turun temurun, di mana orang tua tidak mengharuskan anaknya untuk melanjutkan sekolah.

Keterbatasan keluarga nelayan dalam mengakses pendidikan dasar yang bersifat formal maupun pendidikan lain yang sifatnya

informal harus ditingkatkan, pemangku kepentingan harus memprioritaskan akan hal ini dengan membangun fasilitas pendidikan di dekat pemukiman nelayan, membangun akses pasar, seperti jalan. Selain memberikan variasi pilihan pendidikan baik formal maupun informal, hingga penyelenggaraan setara paket A, B dan C. Jika kondisi pendidikan pada anak nelayan jauh lebih baik, minimal memenuhi pendidikan dasar bahkan menengah, akan memudahkan nelayan tersebut dalam memanfaatkan teknologi juga perkembangan informasi lainnya.

B. Perubahan Pola Usaha

Masyarakat pesisir terkadang dapat bekerja baik sebagai nelayan, petani atau kerja serabutan lainnya seperti tukang bangunan, buruh pasar dan sebagainya. Hal ini disebabkan adanya musim-musim yang berlangsung di laut. Ada angin barat maupun angin timur, mempengaruhi pola atau curahan waktu untuk menangkap ikan. Saat musim ikan sedikit, para nelayan beralih menjadi petani, tukang bangunan, atau pekerjaan lainnya, dan pada musim tertentu, nelayan akan kembali melaut. Hal ini merupakan pola adaptasi atau pola perubahan usaha nelayan terhadap kondisi iklim yang terjadi. Sebagai suatu kelompok masyarakat, nelayan di pesisir memiliki cirri-ciri yaitu hidup bersama, berinteraksi, dan bekerja sama untuk waktu yang lama, sadar sebagai satu kesatuan, dan sadar sebagai suatu sistem hidup bersama. Hal tersebut juga terjadi pada masyarakat nelayan di pesisir Waingapu.

Secara umum masyarakat nelayan di Indonesia mempunyai ciri perekonomian sebagai berikut:

- Pendapatannya umumnya di bawah standar nasional
- Kesenjangan pendapatan yang diakibatkan oleh perbedaan

- sumber daya, tipe armada dan alat tangkap, dan akses pasar.
- Sumber daya yang berfluktuasi dan ketersediaan pasar menyebabkan variasi pendapatan dan ketidakpastian.
 - Investment agak sulit dilakukan, dan modal berlebih di beberapa lapisan masyarakat.
 - Berhadapan langsung dengan kondisi alam yang berbahaya seperti: angin, arus air, kesulitan air bersih, dan badai.

Masyarakat nelayan pesisir merupakan suatu kelompok yang memiliki wujud dan unsur kebudayaan yang spesifik, antara masyarakat pesisir di satu wilayah dengan wilayah lainnya. Keterkaitan komunitas nelayan dengan lingkungan dapat dilihat dari kapasitas kelompok nelayan dalam mengelola potensi sumber daya alam dan lingkungan. Sinergi antara subsistem, yaitu teknologi dan sumber daya manusia dengan permintaan konsumen yang dipenuhi oleh subsistem pascaproduksi akan menjamin pendapatan rumah tangga nelayan.

Nelayan sebagai bagian dari masyarakat pesisir diartikan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya. Sedangkan orang yang hanya melakukan pekerjaan membuat jarring atau mengangkut peralatan ke armada, bukanlah nelayan. Sedangkan juru mesin dan ABK yang melakukan berbagai kegiatan di kapal penangkap ikan bisa disebut sebagai nelayan (Ditjen Perikanan, 2000). Kebergantungan nelayan yang tinggi pada dukungan eksternal, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik menyebabkan lemahnya stabilitas ekonomi dan kesejahteraan mereka. Diperlukan tiga hal untuk mengembangkan keberlanjutan lembaga dan pemberdayaan, yaitu kesadaran akan perubahan, inisiasi pengembangan usaha, dan pengorganisasian kelompok.

Nelayan sebenarnya dapat dibagi menjadi empat kategori (Satria, 2001), yaitu:

1. *Peasant fisher* atau nelayan tradisional yang bersifat subsistem.
2. *Post-peasant fisher*, nelayan yang telah menggunakan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju seperti motor temple atau kapal motor, beroperasi di wilayah pesisir, dan mulai berorientasi pasar, ABK tidak tergantung pada tenaga kerja keluarga.
3. *Commercial fisher* (Nelayan komersial), nelayan yang telah berorientasi profit, teknologi modern dan membutuhkan keahlian tersendiri untuk mengoperasikannya.
4. *Industrial fisher*, nelayan industri dengan ciri-ciri mengorganisasikan system agribisnis yang modern, relative padat modal, kontribusi pendapatan yang lebih tinggi kepada pemilik awak, daripada yang didapat oleh nelayan tradisional, dan memproduksi ikan kaleng, dan ikan beku yang berorientasi ekspor.

Menurut empat kategori di atas nelayan yang ada di Kelurahan Kamalapati di pesisir Waingapu termasuk dalam kategori kedua yaitu *post-peasant fisher*.

Sedangkan Charles (2001, dalam Widodo, 2006) membagi kelompok nelayan dalam empat kelompok yaitu:

1. Nelayan subsisten (*subsistence fishers*), yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
2. Nelayan asli (*native/indigenous/aboriginal fishers*), yaitu nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil.

3. Nelayan rekreasi (*recreational/sport fishers*), yaitu orang-orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya sekedar untuk kesenangan atau berolahraga, dan
4. Nelayan komersial (*commercial fishers*), yaitu mereka yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. Kelompok nelayan ini dibagi dua, yaitu nelayan *skala kecil* dan *skala besar*.

Dari empat pengelompokan tersebut sudah sangat sulit menemukan dua kelompok yang pertama. Sementara kelompok ketiga walaupun di beberapa negara maju berbagai kegiatannya telah terdokumentasi dengan baik namun di beberapa negara berkembang seperti Indonesia misalnya, sulit ditemukan. Di samping pengelompokan tersebut, terdapat beberapa terminologi yang sering digunakan untuk menggambarkan kelompok nelayan, seperti nelayan penuh untuk mereka yang menggantungkan keseluruhan hidupnya dari menangkap ikan; nelayan sambilan untuk mereka yang hanya sebagian dari hidupnya tergantung dari menangkap ikan (lainnya dari aktivitas seperti pertanian, buruh dan tukang); juragan untuk mereka yang memiliki sumberdaya ekonomi untuk usaha perikanan seperti kapal dan alat tangkap; dan anak buah kapal (ABK/pandega) untuk mereka yang mengalokasikan waktunya dan memperoleh pendapatan dari hasil pengoperasian alat tangkap ikan, seperti kapal milik juragan.

Di samping pembagian di atas, Widodo (2006) juga mengemukakan beberapa pembagian lain seperti daya jangkau armada perikanan dan juga lokasi penangkapan ikan. Dapat disebutkan misalnya nelayan pantai atau biasanya disebut:

1. Perikanan pantai untuk usaha perikanan skala kecil dengan armada yang didominasi oleh perahu tanpa motor atau kapal motor tempel,
2. Perikanan lepas pantai untuk perikanan dengan kapasitas perahu rata-rata 30 GT, dan
3. Perikanan samudera untuk kapal-kapal ukuran besar misalnya 100 GT dengan target perikanan tunggal seperti tuna.

Dalam kategori ini nelayan yang ada di Kelurahan Kamalapati di pesisir Waingapu termasuk dalam kategori pertama.

Apabila terjadi angin kencang yang disertai hujan dan mengakibatkan gelombang tinggi di laut lepas perairan Kabupaten Sumba Timur, NTT. Maka sebagian besar nelayan di Waingapu memilih untuk urung melaut. Minimnya hasil tangkapan akibat sedikitnya nelayan yang turun melaut berimbas pada harga ikan laut segar yang melonjak tinggi. Los penjual ikan di Pasar Inpres (Paris) Matawai, di Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, yang biasanya ramai oleh transaksi jual beli ikan, nampak lengang. Hanya beberapa pedagang saja yang nampak menggelar jualan ikannya di atas lapak. Sementara itu, seperti terpantau di dekat pelabuhan Waingapu, nampak banyak perahu nelayan yang ditambatkan dengan cara berlindung di balik pepohonan bakau. Sementara nelayan lainnya mengisi waktu dengan memperbaiki pukat dan jala juga mengecat perahu (<http://www.waingapu.com/>, diakses 4 Desember 2013).

Untuk mengadakan atau upaya dalam rangka perubahan pola usaha bagi para nelayan perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Perlu adanya penelitian tentang potensi perairan laut sehingga terinventarisir secara merata/informasi secara baik dan akurat.

2. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pemanfaatan sumber daya ikan.
3. Perlu adanya bantuan modal kepada petani /nelayan ikan baik dari pihak pemerintah maupun swasta dalam rangka pemanfaatan potensi sumber daya ikan
4. Perlu kesiapan pengusaha dalam hal menyediakan sarana, prasarana dan dapat menempatkan tenaga teknis lapangan
5. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik aparat maupun nelayan ikan melalui pendidikan dan pelatihan.

Jadi stereotipe seperti boros dan malas oleh berbagai pihak sering dianggap menjadi penyebab kurang sejahteranya nelayan. Padahal kultur nelayan jika dicermati justru memiliki etos kerja yang handal. Sebagai contoh, mereka pergi subuh pulang siang, bahkan pada masa tertentu nelayan terpaksa harus beberapa hari di laut dan menjual ikan hasil tangkapan di laut melalui para tengkulak yang menemui mereka ditengah laut, kemudian menyempatkan waktu pada waktu senggang untuk memperbaiki jaring. Memang ada sebagian nelayan yang mempunyai kebiasaan dan budaya boros dan lupa akan kondisi ketika mengalami kesusahan.

Perlu adanya upaya merubah cara berpikir nelayan dan keluarganya, terutama mengenai kemampuan dalam mengelola keuangan disesuaikan dengan kondisi normal dan paceklik, selain mencari alternatif aktivitas disaat kondisi cuaca tidak menentu. Bahwa musim paceklik akan hadir dalam setiap tahunnya, oleh karenanya berbagai strategi adaptasi dilakukan masyarakat nelayan untuk bertahan hidup. Strategi adaptasi yang biasanya dilakukan adalah memobilisasi peran perempuan (kaum istri) dan anak-anaknya untuk mencari nafkah. Keterlibatan perempuan

dalam mencari nafkah untuk keluarga di wilayah pesisir atau desa-desa nelayan tidak terlepas dari sistem pembagian kerja secara berdasarkan jenis kelamin (*the division of labour by sex*) yang berlaku pada masyarakat setempat.

Kaum perempuan biasanya terlibat penuh dalam kegiatan pranata-pranata sosial ekonomi yang mereka bentuk, seperti arisan, kegiatan pengajian berdimensi kepentingan ekonomi, simpan pinjam, dan jaringan sosial yang bisa mereka manfaatkan untuk menunjang kelangsungan hidup keluarga. Hadirnya pranata-pranata tersebut merupakan strategi adaptasi masyarakat nelayan dalam menghadapi kesulitan hidup yang dihadapinya. Strategi adaptasi diartikan sebagai pilihan tindakan yang bersifat rasional dan efektif sesuai dengan konteks lingkungan sosial, politik, ekonomi dan ekologi, di mana penduduk miskin itu hidup.

Dalam hal ini peran kaum perempuan nelayan tidak lagi berada pada ranah domestik (rumah tangga) tetapi telah memasuki ranah publik (masyarakat luas). Dalam beberapa kasus, untuk menambah penghasilan keluarga, para kaum perempuan nelayan bahkan terpaksa menitipkan anak mereka yang masih kecil untuk di rawat kepada anaknya yang lebih tua atau tetangga yang tidak bekerja, karena suaminya bukan berprofesi sebagai nelayan, misalkan guru, pedagang, petani dan lain sebagainya di luar profesi sebagai nelayan. Sedangkan strategi adaptasi yang dilakukan para nelayan (kaum suami) adalah diversifikasi pekerjaan untuk memperoleh sumber penghasilan baru, seperti menjadi buruh di pasar, bertukang dan bertani (bagi nelayan di pedesaan).

Berkaitan dengan diversifikasi pekerjaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pemangku kepentingan diharapkan mampu mencarikan potensi baik kewilayahan, maupun keterampilan masyarakat nelayan. Hal ini

perlu, agar ada diversifikasi yang lebih menguntungkan, apakah melalui upaya mengembangkan pariwisata setempat, pengolahan hasil tangkapan laut menjadi makanan khas, hingga upaya budidaya ikan. Selain itu perlu membangun jejaring di antara pemangku kepentingan berdasarkan kapastitasnya. Misalnya LSM dengan memberikan pendampingan dan pelatihan, pemerintah memberikan dukungan perizinan dan fasilitas dan pengusaha memberikan bantuan modal. Dengan konsep ini, diharapkan kondisi paceklik, tidak akan terlalu besar dampaknya bagi masyarakat nelayan karena sudah terbentuk alternatif pekerjaan yang sama-sama menguntungkan.

C. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tangkapan

Tidak semua daerah pesisir memiliki tempat pelelangan ikan (TPI). Hal tersebut membuat para nelayan terpaksa untuk menjual hasil tangkapan mereka kepada tengkulak dengan harga yang jauh di bawah harga pasaran. Kondisi ini yang selalu mengakibatkan nelayan tidak pernah untung, keterbatasan infrastruktur menjadikan nelayan merugi, tidak seimbangny antara biaya yang dikeluarkan untuk melaut, dengan keuntungan hasil jual, karena harga dipermainkan oleh pihak tengkulak

Upaya yang mungkin dilakukan agar nelayan tidak terjatet lingkaran tengkulak adalah dengan mengembangkan fungsi lembaga keuangan mikro dan koperasi yang memihak nelayan, selain itu perlu adanya upaya membangun usaha bersama, seperti melalui pemilikan sarana-sarana penangkapan dan pemasaran secara kolektif.

Selain itu kebudayaan nelayan yang berbahaya namun terabaikan adalah terjalinnnya relasi sosial ekonomi yang sifatnya eksploitatif dengan pemilik perahu dan pedagang perantara

(tengkulak) dalam kehidupan masyarakat nelayan. Kondisi tersebut bisa diperbaiki dengan mengurangi beban utang piutang yang kompleks para nelayan kepada pemilik perahu dan tengkulak dengan mencarikan alternatif keuangan mikro. Harus adanya upaya dalam memperbaiki norma sistem bagi hasil dalam organisasi penangkapan, sehingga tidak merugikan nelayan. Selain itu perlu mengoptimalkan peran lembaga ekonomi lokal, seperti KUD Mina.

Di sisi lain rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan, berdampak sulitnya peningkatan skala usaha dan perbaikan kualitas hidup, upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pemilikan lebih dari satu jenis alat tangkap, agar bisa menangkap sepanjang musim, mengembangkan diversifikasi usaha berbasis bahan baku perikanan atau hasil budidaya perairan, seperti rumput laut, memperluas kesempatan kerja sektor *off fishing* dan melakukan transmigrasi nelayan pada wilayah lain yang masih memiliki potensi kelautan.

Namun yang menjadi masalah adalah tidak semua nelayan memiliki perahu sendiri. Nelayan yang tidak mempunyai modal untuk membeli perahu, terpaksa meminjam uang kepada tengkulak. Pada umumnya para tengkulak (patron) memberikan pinjaman kalau hasil tangkapan nelayan (klien) minim. Ketergantungan nelayan pada tengkulak berawal dari utang/pinjaman, dan biasanya dilakukan pada saat paceklik atau memperbaiki kerusakan alat tangkap seperti jaring dan mengganti tali kajar. Meskipun demikian, ada juga pihak yang menilai bahwa keberadaan para tengkulak tersebut justru menolong nelayan. Kondisi ini terjadi karena negara tidak mampu memberikan pinjaman lunak, dan walaupun ada bank, mereka juga tidak bisa mengaksesnya karena alat tangkap sebagai faktor produksi tidak bisa dijadikan agunan.

Dalam perspektif struktural kemiskinan nelayan tidak hanya disebabkan hubungan patron-klien yang menimbulkan jeratan utang dan mengarah pada bentuk eksploitasi. Tetapi kemiskinan nelayan juga terjadi karena keterbatasan akses nelayan terhadap hak penguasaan sumberdaya perikanan. Penguasaan atas sumber daya perikanan selama ini lebih banyak dinikmati oleh kolaborasi pemilik modal dan birokrat. Sebagai fakta adalah masih beroperasinya pukat harimau (*trawl*) di seluruh perairan Indonesia yang berakibat pada penyerobotan terhadap wilayah tangkap nelayan tradisional (*traditional fishing ground*).

Bahkan adanya musim-musim tertentu di mana ikan jenis tertentu banyak dan sedikit menggambarkan bahwa kehidupan mereka tergantung pada rejeki laut. Dalam satu daerah di mana terdapat desa-desa pesisir juga memiliki perbedaan dalam tingkat kesurplusan sumber daya perikanan. Bahkan ukuran rumah yang terbuat dari bilik bambu dan sudah condong belum tentu bisa menjadi ukuran miskin karena mungkin saja ditemukan barang elektronik seperti TV. Pola hubungan patron klien memungkinkan mereka berutang dalam artian digunakan pada tujuan yang baik maupun tidak semisal membeli suatu barang berharga di rumah. Sehingga tak heran jika, umumnya nelayan berenang dalam kubangan utang. Penghasilan besar dan lumayan tidaklah susah diperoleh ketika musim ikan banyak. Bahkan bisa tiga kali lipat, sekalipun dengan sistem bagi hasil dengan tokehnya. Tapi besoknya, mungkin hanya dapat untuk makan keluarga bahkan kurang, lalu kemudian meminjam ke tokeh, begitu seterusnya.

Namun berdasarkan pandangan nelayan (perspektif *emic*), kuatnya pola patron-klien di masyarakat nelayan disebabkan oleh kegiatan perikanan yang penuh resiko dan ketidakpastian sehingga tidak ada pilihan lain bagi mereka selain bergantung pada pemilik

modal (patron). Dari hal tersebut, bisa dibayangkan apa yang akan diterima para nelayan dengan sistem yang demikian, sehingga sangatlah wajar jika kemiskinan menjadi bagian yang akrab dalam kehidupan mereka.



Gambar 4.3. Pedagang ikan keliling di Kota Waingapu mempunyai peran penting dalam pemasaran hasil tangkapan nelayan Waingapu.

Sumber: Dokumen Tim Penulis

Pola usaha dan pemasaran para nelayan di Kamalapati Waingapu belum besar dan mencapai komoditas ekspor. Pemasarannya hanya cukup untuk suplai kebutuhan ikan di Kota Waingapu dan sekitarnya. Tempat pelelangan ikan (TPI) atau pusat pendaratan ikan (PPI) juga belum dimiliki, sehingga fluktuasi harga kadang-kadang belum bisa dikendalikan.

D. Peran Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan

1. Peningkatan Partisipasi

Berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan memerlukan partisipasi dari para nelayan berupa suatu gerakan sosial. Gerakan sosial nelayan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan hidup nelayan. Gerakan sosial ini terangkum dalam organisasi sosial untuk mengatasi akses ketimpangan sumber daya perikanan. Contoh gerakan sosial nelayan antara lain, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA).

Program-program peningkatan perekonomian masyarakat nelayan telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Gerakan nasional yang menelan dana besar telah dilakukan pada 1970-an dan 1980-an. Sejak 2001 pihak pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pesisir dengan membentuk Departemen Perikanan dan Kelautan khususnya Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir yang menangani masalah sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Dengan demikian, buku ini cocok dibaca kalangan pemegang kebijakan dalam hal ini pihak pemerintah daerah yang mengelola potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, buku ini juga bermanfaat bagi kalangan praktisi, akademisi, peneliti, dan LSM, yang berminat dan peduli pada kehidupan masyarakat pesisir.

Selama ini telah banyak para ahli yang menyinggung masalah kemiskinan pada masyarakat nelayan. Kebijakan ekonomi pesisir ini menekankan strategi dan pendekatan empiris untuk mengatasi kemiskinan pada masyarakat nelayan baik dari

segi sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan demikian program pemerintah adalah meningkatkan partisipasi dan “menggeliatkan” kehidupan masyarakat nelayan agar mereka memiliki keberdayaan dan kedigjayaan untuk mendorong dinamika sosial ekonomi masyarakat pesisir. Pendekatan yang ditawarkan benar-benar praktis dan menyentuh kepentingan masyarakat secara integratif meliputi pendekatan, budaya, sosial, dan ekonomi. Jadi, pada hakikatnya pemerintah dan para khalayak yang peduli terhadap keberadaan masyarakat pesisir khususnya nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penawaran program-program tersebut dikemas dalam sebuah program yang melibatkan partisipasi dari seluruh unsur masyarakat nelayan.

Banyak program telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan nelayan. Program yang bersifat umum antara lain Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Keluarga Sejahtera, Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Sedangkan program yang secara khusus ditujukan untuk kelompok sasaran masyarakat nelayan antara lain program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP) dan Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK).

Namun, secara umum program-program tersebut tidak membuat nasib nelayan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Salah satu penyebab kurang berhasilnya program-program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan nelayan adalah formulasi kebijakan yang bersifat *top down*. Formula yang diberikan cenderung seragam padahal masalah yang dihadapi nelayan sangat beragam dan seringkali sangat spesifik lokal. Di samping itu, upaya penanggulangan kemiskinan nelayan seringkali sangat

bersifat teknis perikanan, yakni bagaimana upaya meningkatkan produksi hasil tangkapan, sementara kemiskinan harus dipandang secara holistik karena permasalahan yang dihadapi sesungguhnya jauh lebih kompleks dari itu.

Oleh karena itu, perlu sekali diterbitkan sebuah kebijakan sosial yang berisikan keterpaduan penanganan kemiskinan nelayan sebagaimana yang mereka butuhkan, kebijakan tersebut juga harus didukung oleh kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten atau kota yang di dalamnya terdapat masyarakat miskin khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan keegoan dari masing-masing pemangku kepentingan. Keterpaduan tersebut adalah sebagai berikut: *pertama*, keterpaduan sektor dalam tanggung jawab dan kebijakan. Keputusan penanganan kemiskinan nelayan harus diambil melalui proses koordinasi di-internal pemerintah, yang perlu digarisbawahi adalah kemiskinan nelayan tidak akan mampu ditangani secara kelembagaan oleh sektor kelautan dan perikanan, melainkan seluruh pihak terkait.

Kedua, keterpaduan keahlian dan pengetahuan, untuk merumuskan berbagai kebijakan, strategi, dan program harus didukung berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan keahlian, tujuannya adalah agar perencanaan yang disusun betul-betul sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat nelayan. *Ketiga*, keterpaduan masalah dan pemecahan masalah sangat diperlukan untuk mengetahui akar permasalahan yang sesungguhnya, sehingga kebijakan yang dibuat bersifat komprehensif, dan tidak parsial. *Keempat*, keterpaduan lokasi, memudahkan dalam melakukan pendampingan, penyuluhan dan pelayanan (lintas sektor), sehingga program tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Kegagalan penanganan kemiskinan nelayan ini selama ini, di samping kurangnya keterpaduan, juga terdapatnya berbagai kelemahan dalam perencanaan. Untuk itu dalam proses perencanaan harus unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perumusan sasaran yang jelas, berupa hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan yang dibuat, kelembagaan yang bertanggung jawab, serta objek dari kegiatan.
2. Pengidentifikasian situasi yang ada, yaitu dengan mempertimbangkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman), tujuannya untuk mengetahui kondisi sesungguhnya tentang objek yang akan ditangani. Selanjutnya akan memudahkan dalam menyusun berbagai strategi yang mendukung penanganan kemiskinan nelayan.
3. Penentuan tujuan harus bersifat spesifik (objek, kegiatan, dibatasi waktu dan terukur), sehingga pengentasan kemiskinan nelayan jelas siapa sasarannya dan jenis kegiatan yang akan dilakukan, dan selanjutnya berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan dapat ditentukan dengan jelas.
4. Menganalisa keadaan, pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan antara ketentuan yang telah ditetapkan dengan realitas yang ada di lapangan, dan apabila terjadi permasalahan di luar dugaan, maka perlu segera dibuatkan strategi dan tindakan baru untuk menutup jurang perbedaan.
5. Pendampingan, monitoring dan evaluasi, pendampingan harus dilakukan awal kegiatan dilaksanakan, sampai pascakegiatan, sehingga akan menjadi bahan evaluasi, apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Program lainnya berupa pemberian bantuan sarana dan prasarana alat tangkap bagi nelayan. Untuk 2013, Kelurahan Kamalapati mendapatkan bantuan alat tangkap berupa pukat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur yang dibagikan kepada 8 orang nelayan di Kelurahan Kamalapati yakni:

- Abdul Rasyid Umar Abdul Kadir: 3 buah pukat multifilamen ukuran $2\frac{1}{2}$ "
- Muhammad Ibrahim: 3 buah pukat multifilamen ukuran $2\frac{1}{2}$ "
- Ismail Zakaria: 3 buah pukat multifilamen ukuran $2\frac{1}{2}$ "
- Yohanis Lulu : 3 buah pukat monofilamen ukuran $1\frac{1}{4}$ "
- Zainudin Kasim: 3 buah pukat monofilamen ukuran 1" dan 2 buah pukat multifilamen ukuran 2"
- Ramadan Hasan: 3 buah pukat monofilamen ukuran 1" dan 3 buah pukat multifilamen ukuran 2"
- Ruslan Karipi: 3 buah pukat monofilamen ukuran 1" dan 3 buah pukat multifilamen ukuran $2\frac{1}{2}$ "
- Alfian Hasan: 3 buah pukat monofilamen ukuran 1" dan 2 buah pukat multifilamen ukuran 2"

(Sumber: Laporan Tahunan Kalurahan Kamalapati 2013)

Selain pemberian bantuan tersebut juga dibentuk kelompok nelayan tangkap di Waingapu. Terdapat 3 (Tiga) kelompok usaha perikanan tangkap di Kelurahan Kamalapati yang terbentuk yakni:

1. KUB Maju Bersama yang dibentuk pada 3 Mei 2011 dan telah dikukuhkan pada 5 Maret 2012 dengan anggota sebanyak lima belas orang;
2. KUB Tenggiri yang dibentuk pada 25 April 2012 dan telah dikukuhkan pada 27 Agustus 2012 dengan anggota sebanyak delapan belas orang;

3. KUB Pesisir Mandiri, yang dibentuk pada 26 April 2012 dan telah dikukuhkan pada 27 Agustus 2012 dengan anggota sebanyak empat puluh tujuh orang.

Dalam anggaran dasar (AD) KUB dijelaskan bahwa pembentukan kelompok nelayan ini dibentuk dari, oleh dan untuk nelayan sendiri dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat nelayan dalam sebuah lembaga serta saling membantu di antara anggota kelompok dengan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan nelayan agar mampu dalam mengelola sumber daya laut serta meningkatkan ekonomi nelayan. Pengurus, keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, fungsi pengawas dan pelaksanaan rapat anggota sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga (ART) KUB.

Dalam rangka pengembangan usaha, kelompok akan menghimpun modal dari anggota dan pihak ketiga berupa pinjaman atau sistem bagi hasil lainnya dengan persyaratan yang tidak memberatkan kelompok.

Adapun rapat anggota dilakukan rutin setiap bulan dengan tujuan:

1. Mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai dalam bulan tersebut
2. Mengatasi masalah sevara bersama dalam kelompok
3. Penyetoran simpanan wajib dan penyetoran pengembalian bagi yang telah meminjam

Rapat anggota dianggap sah apabila memenuhi syarat 2/3 ditambah 1 orang dari jumlah anggota yang hadir.

Keuntungan usaha dihitung dan dibagi pada akhir tahun anggaran yang didasarkan pada jumlah modal yang disetor

atau kontribusi lainnya sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok. Dari 3 KUB yang ada di Kelurahan Kamalapati, 2 KUB telah mendapatkan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur yakni KUB Maju Bersama dan KUB Tenggiri berupa mesin dompeng berkekuatan 16 Pk sebanyak 3 buah, mesin dompeng berkekuatan 24 Pk sebanyak 4 buah, generator sebanyak 2 buah dan sejumlah uang tunai.

2. Bantuan Modal dan Program Kesejahteraan

Akses para nelayan ke sumber daya produktif termasuk permodalan dan layanan usaha bisanya masih sangat terbatas. Dukungan kredit untuk usaha nelayan dalam mendukung kebutuhan modal untuk kegiatan nelayan masih sangat terbatas. Kredit yang tersedia selama ini biasanya hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif ataupun untuk ketahanan kebutuhan pokok sehari-hari. Sementara jumlah kredit perbankan yang teralokasikan untuk usaha perikanan hanya sekitar 0,02% dari seluruh total kredit, (Amanah dan Farmayanti, 2014:79). Keterbatasan modal kurang mendorong para nelayan untuk menerapkan teknologi baru dan meningkatkan produktivitas, membatasi peningkatan nilai tambah, dan mengakibatkan ketergantungan pada penyediaan modal informal (tengkulak). Akses para nelayan terhadap prasarana dan sarana peralatan modern juga menghambat pemasaran produk perikanan sehingga menekan harga produk. Hal ini antara lain disebabkan oleh belum berpihaknya kebijakan ekonomi makro yang berpihak kepada para petani dan nelayan, dan lemahnya koordinasi antarlembaga baik di pusat maupun di daerah. Beberapa hal tersebut di atas juga dialami oleh para nelayan di Waingapu, kurangnya permodalan dan akses pasar yang lebih luas. Hasil tangkapan hanya cukup

untuk mensuplai kebutuhan ikan lokal. Keterbatasan peralatan dan kapasitas produksi menyebabkan hal tersebut hal terjadi (hasil FGD dengan Kelompok Nelayan Tengiri, April 2014).

Masih rendahnya sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi pengolahan produk perikanan. Nilai tambah komoditas ini masih rendah karena pada umumnya penjualan dilakukan dalam bentuk segar (produk primer) dan olahan sederhana. Perkembangan industri hasil perikanan belum optimal, yang ditunjukkan oleh rendahnya tingkat produksi hasil industri perikanan. Peningkatan nilai tambah produk perikanan melalui proses pengolahan memerlukan modal, investasi, dan teknologi pengolahan yang lebih modern. Kondisi semacam ini masih diperparah oleh semakin tingginya persaingan produk dari luar negeri, baik yang masuk secara legal maupun ilegal. Jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan akses modal dan pemasaran mempunyai peran penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para nelayan.

Selain pemberian modal berupa alat tangkap dan perlengkapan lainnya seperti yang telah disebutkan dalam subbab di atas, masyarakat nelayan di Waingapu juga diikuti berbagai program baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah melalui dinas terkait, antara lain:

a. Program Keluarga Harapan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan sejak 2007 dan untuk Kecamatan Kota Waingapu khususnya Kelurahan Kamalaputi pada Desember 2012 telah dilakukan pendataan dan sosialisasi Program Keluarga Harapan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sumba Timur selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Sumba Timur. Untuk Kelurahan Kamalaputi Keadaan 31 Desember 2013, Total RTS Miskin penerima manfaat kegiatan

ini berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sumba Timur sebanyak seratus delapan kepala keluarga.

Tujuan dari pelaksanaan program ini yakni:

- (1) Meningkatkan status kesehatan ibu dan anak khususnya bagi kelompok rumah tangga sasaran miskin (RTS Miskin) melalui pemberian insentif;
- (2) Mengembangkan dan meningkatkan angka partisipasi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga sangat miskin.

Sasaran dan Jumlah Dana yang diberikan:

- (1) Ibu hamil dan Balita, sebesar Rp. 1.000.000,- per tahun
- (2) Anak SD, sebesar Rp. 500.000,- per tahun
- (3) Anak SMP, sebesar Rp. 1.000.000,- per tiga tahun.

b. Program Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)

Merupakan program dari Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertujuan membantu para lanjut usia dengan sasaran mereka yang terlantar. Program ini berlaku sejak Januari 2012 di mana masyarakat lanjut usia pada Kelurahan Kamalapati sebagai salah satu penerima bantuan ini. Bantuan berupa uang tunai yang diberikan per empat bulan sekali dengan jumlah sebesar Rp. 800.000,- di mana pemberian bantuan ini diberikan selama hidup. Untuk 2013, jumlah penerima program ini adalah sebanyak sebelas orang lansia dan telah terealisasi sepenuhnya.

c. Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SEHAT)

Program ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang telah ditindaklanjuti dengan sosialisasi di Kelurahan Kamalapati pada 14 November 2012 oleh Badan Pertanahan Nasional Indonesia dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur

Tujuan dari kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SEHAT) yakni:

- (1) memberikan kepastian/status hukum atas kekayaan (aset) milik nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil;
- (2) Memberikan jaminan pada nelayan untuk meningkatkan kualitas pemukiman yang layak, permanen dan sehat;
- (3) Meningkatkan kepastian usaha nelayan melalui kepemilikan aset berupa tanah yang dapat digunakan sebagai agunan untuk mengakses sumber-sumber permodalan.

Total masyarakat Kelurahan Kamalapati yang diakomodir oleh program ini ditahun 2013 sebanyak dua puluh lima orang dan kesemuanya telah menerima sertifikat tanah.

d. Dana Usaha Ekonomi Produktif SMART

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumba Timur melaksanakan kegiatan pendanaan kegiatan-kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat dengan garis besar program SMART baik dibidang pertanian, perikanan, peternakan dan usaha koperasi dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat

Kabupaten Sumba Timur pada umumnya dan khususnya masyarakat kelurahan/desa sasaran program. Program ini sangat menyentuh harapan dari masyarakat miskin yang selama ini masih mengharapkan adanya program-program pemerintah yang pada pelaksanaannya langsung menyentuh kelompok-kelompok marginal di desa/kelurahan untuk menjawab kebutuhannya.

Untuk tahap pertama program ini, penerima bantuan diperuntukan bagi satu kelurahan dan tiga desa di Kabupaten Sumba Timur dengan Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah masyarakat miskin. Kelurahan Kamalapati ditunjuk sebagai salah satu penerima program SMART Tahap I ini.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- (1) Meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat;
- (2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- (3) Memupuk rasa solidaritas dan gotong royong yang tinggi antar sesama masyarakat dalam kehidupan berkelompok.

Kelompok usaha dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat antara Pemerintah Kelurahan Kamalapati, masyarakat dan pendamping kelompok masyarakat (PKM) dengan komposisi kelompok yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Total dana untuk Kelurahan Kamalapati adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Kewajiban setiap kelompok yakni menyiapkan:

- Buku tabungan kelompok usaha pada Bank NTT;
- Buku kunjungan tamu
- Buku KAS kelompok
- Buku pertemuan kelompok dengan PKM

Setiap kelompok usaha telah menyepakati jangka waktu usaha selama satu tahun dengan bunga sebesar 1%.

Kelompok yang terbentuk di Kelurahan Kamalapati yakni:

- Kelompok Asal Ingat
- Kelompok Asam Arab
- Kelompok Tanjung Pesisir
- Kelompok Barakuda
- Kelompok Mandiri
- Kelompok Talenta
- Kelompok Berkarya
- Kelompok Nangka Dua
- Kelompok Wanggameti
- Kelompok Karya Maju

Dari sepuluh kelompok yang terbentuk, terdapat dua kelompok yang menunggak pembayaran yakni kelompok Nangka Dua dan kelompok Karya Maju.

Sementara itu, dari hasil evaluasi terhadap pengembalian dana dari kegiatan ini pada akhir 2012, dan atas usulan dari pendamping program SMART, disepakati untuk dibentuk penambahan dua kelompok baru di awal 2013 yakni Kelompok Pesisir Pantai dan Kelompok Teratai. Total kelompok yang terbentuk sebanyak dua belas.

3. Usaha Pemberdayaan yang Dilakukan

Pemberdayaan dapat dilihat dari segi struktur, kebijakan, aspek praktis, dan berfokus pada persepsi pemberdayaan seseorang yang *me-review* posisi dan statusnya dan berfokus pada aspek yang mikro. Model pemberdayaan yang dilakukan dalam hal ini kepada nelayan adalah pengembangan inisiatif untuk pemberdayaan diri

dan pengembangan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam hal usaha, berorganisasi, dan menjaga keseimbangan alam dan lingkungan.

Tiga landasan utama pengembangan kelembagaan sosial sebagai substansi pemberdayaan meliputi kesadaran akan perubahan, inisiasi pengembangan kelembagaan dan partisipasi, serta pengorganisasian kelompok (Amanah dan Farmayanti, 2014:17). Dalam pemberdayaan pada komunitas nelayan meliputi:

- a. Nilai-nilai kerja sama, dan motivasi untuk maju merupakan faktor dominan yang dapat meningkatkan efektivitas kelembagaan.
- b. Struktur dan norma berperilaku dalam dikembangkan oleh kelompok nelayan melalui pendampingan partisipatif.
- c. Daya saing komoditas yang dihasilkan meningkat.
- d. Kelompok berperan sebagai pusat kegiatan nelayan, wadah belajar, wadah eksistensi sosial kemasyarakatan setempat, dan ada usaha produktif yang dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah.

Pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh tenaga yang dimiliki sekelompok orang untuk bertindak mengambil keputusan atau beragam pilihan yang ada. Daya itu sendiri baru akan dimiliki nelayan apabila mereka memiliki peluang dan kemampuan. Agar pemberdayaan yang dilakukan dapat mencapai hasil yang diharapkan perlu diketahui dimensi pemberdayaan. Dimensi pemberdayaan umumnya meliputi aspek fisik dan nonfisik. Aspek fisik meliputi sarana dan prasarana, dan aspek nonfisik meliputi sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, gender, dan jaringan kerja sama. Pemberdayaan tidak akan mencapai tujuan apabila dimaksudkan hanya berfokus pada aspek fisik saja. Beberapa teori

dan pengertian di atas kiranya telah dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di pesisir Waingapu, hal itu bias dilihat dari beberapa program yang telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya.

Masyarakat wilayah pesisir Indonesia sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Mereka menggantungkan hidup dari kekayaan bioekologi laut dan menempatkan laut sebagai orientasi kehidupan. Laut dianggap sebagai sumber daya yang bersifat korporatif tertutup yang pengelolaannya diarahkan pada perwujudan demokrasi lokal di bidang politik dan ekonomi. Misalnya dalam penerapan tradisi sasi dan kawang pada masyarakat nelayan di perairan Kepulauan Maluku (Atmaja, 1998). Kehidupan mereka sangat tergantung dengan laut dan hampir seluruh waktu hidupnya dilalui di laut. Contoh lain, misalnya Etnis Bugis dan Bajo merupakan masyarakat nelayan dan mendiami hampir seluruh wilayah pesisir di kepulauan Indonesia. Sepanjang hayat mereka mengembara dan mencari penghidupan di laut dan tinggal di rumah-rumah panggung di tepi laut. Bahkan para generasi sebelumnya masih menempatkan laut sebagai tempat bermukim. Mereka tinggal di atas *leppa* (rumah-rumah perahu sekaligus tempat tinggal) dan tidak pernah merasa betah tinggal di darat. Laut merupakan kampung halaman dan mereka tidak dapat dipisahkan dengan laut. Dengan demikian, masyarakat pesisir dan nelayan di Indonesia adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dengan laut. Mereka membentuk suatu sistem terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial dan memiliki simbol-simbol kebudayaan dan sistem nilai yang menjadi acuan berperilaku.

Kemiskinan di kalangan masyarakat pesisir dan nelayan dilatarbelakangi rendahnya perhatian publik maupun pemerintah

selaku penguasa negara dan pemegang kebijakan terhadap kehidupan masyarakat pesisir dan nelayan. Rendahnya perhatian pemerintah telah berlangsung sejak awal kemerdekaan hingga berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Bahkan pada masa orde baru berbagai kebijakan pembangunan seolah-olah hanya berpihak pada masyarakat daratan dan sedikit sekali pembangunan yang menyasar masyarakat pesisir dan pemanfaatan sumber daya kelautan. Kebijakan-kebijakan pembangunan pada masa itu lebih banyak mengarah kepada kehidupan masyarakat agraris khususnya sektor pertanian dan pembangunan industri. Sedangkan formasi kebijakan yang secara substansi berpihak ke wilayah pesisir dan laut sangat terbatas bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada. Kondisi demikian menjadikan masyarakat pesisir dan nelayan Indonesia semakin tersisih dan terbelakang dalam memanfaatkan sumber daya alam sekitarnya yang berakibat pada keterpurukan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi.

Keberdayaan nelayan dan dinamika ekonomi pesisir dirancang untuk memahami eksistensi dan problematika masyarakat nelayan serta menawarkan gagasan atau pemikiran-pemikiran bernas yang berorientasi pada upaya “menggeliatkan” masyarakat nelayan agar mereka memiliki kemampuan dalam mendorong dinamika sosial ekonomi masyarakat pesisir. Kemudian berlanjut pada “misi politik” untuk memberi perhatian lebih besar kepada masyarakat pesisir dan nelayan, pengelolaan yang tepat pada potensi sumber daya alam pesisir, laut, dan masyarakatnya. Akhirnya bermuara pada tujuan final yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir serta mengantarkan masyarakat negeri ini menuju gerbang kesejahteraan sosial dan kemakmuran bersama. Sebelum menginjak pada tujuan akhir meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir, akan terlebih dahulu dikemukakan karakteristik sosial masyarakat nelayan,

identifikasi masalah yang dihadapi masyarakat nelayan serta strategi pemahaman masyarakat. Titik sentral permasalahan yang dihadapi nelayan umumnya berhubungan dengan isu-isu penting seperti: (1) kemiskinan dan kesenjangan sosial; (2) keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar; (3) kualitas SDM yang rendah; (4) degradasi sumber daya lingkungan; (5) kebijakan pembangunan yang belum optimal memihak masyarakat nelayan. Upaya mengatasi permasalahan ini dapat dilakukan dengan memetakan dan memahami secara komprehensif menyangkut sistem sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Pemahaman demikian sangat berguna sebagai modal pengetahuan dan acuan dalam menetapkan langkah-langkah pemberdayaan yang efektif.

Guna mempercepat mengentaskan kemiskinan pada masyarakat pesisir, perlu reorientasi pemikiran pembangunan nasional yang lebih kontekstual dan rasional dengan mengedepankan prinsip-prinsip kerja sama yang sinergis lintas perilaku, lintas instansi, dan lintas sektor, agar sumber daya pembangunan dapat terorganisir dengan baik dan bermanfaat secara optimal. Sebagai masyarakat pesisir yang berprofesi mengelola sumber daya laut, potensi sumber daya kemaritiman nasional tersebut merupakan basis untuk mengembangkan beragam aktivitas ekonomi masyarakat nelayan. Sehingga kawasan pesisir merupakan kawasan potensial untuk menunjang kelanjutan pembangunan nasional.

Gerakan sosial nelayan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan hidup nelayan. Gerakan sosial ini terangkum dalam organisasi sosial untuk mengatasi akses ketimpangan sumberdaya perikanan. Contoh gerakan sosial nelayan antara lain, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA). Program-

program peningkatan perekonomian masyarakat nelayan telah banyak dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Gerakan nasional yang menelan dana besar pernah dilakukan pada 1970-an dan 1980-an. Sejak 2001 pihak pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pesisir dengan membentuk Departemen Perikanan dan Kelautan khususnya Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir yang menangani masalah sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Dengan demikian, buku ini cocok dibaca kalangan pemegang kebijakan dalam hal ini pihak pemerintah daerah yang mengelola potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, buku ini juga bermanfaat bagi kalangan praktisi, akademisi, peneliti, dan LSM, yang berminat dan peduli pada kehidupan masyarakat pesisir.

Usaha-usaha pemberdayaan nelayan yang pernah dilakukan sejak 2006 antara lain: kebijakan-keijakan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat pesisir berupa pemberian dana hibah kepada Koperasi Nelayan dalam rangka penguatan modal atau dikenal dengan nama Dana Penguatan Modal (DPM) koperasi nelayan. Kebijakan ini dikenal sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir tahun anggaran 2006. Dana hibah tersebut harus dijadikan agunan kredit (*cash collateral*) pada lembaga perbankan. Kebijakan PEMP 2006 melibatkan empat lembaga, yaitu:

- Pemerintah (Departemen Kelautan dan Perikanan)
- Lembaga perbankan,
- Koperasi Nelayan dan
- Kelompok Nelayan.

a. Pemerintah (Departemen Kelautan dan Perikanan)

Kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi berupa pemberian hibah dalam rangka penguatan modal koperasi nelayan (DPM) atau dikenal sebagai Dana Ekonomi Produktif (DEP) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir tahun Anggaran 2006 (untuk selanjutnya ditulis PEMP 2006). Dana tersebut ditujukan kepada Masyarakat Pesisir yang lebih dikenal dengan nama kelompok masyarakat nelayan guna membantu mengatasi kesulitan akses permodalan.

Pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan khususnya untuk mensejahterakan masyarakat pesisir, bersama Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif melahirkan berbagai peraturan undang-undang dibidang ekonomi seperti Undang-Undang No 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan Undang-Undang no 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, merupakan sumber hukum (hukum ekonomi) kebijakan Alokasi Dana Program PEMP 2006. Selanjutnya, timbul pertanyaan bahwa sampai sejauh manakah manfaat bagi kelompok nelayan atas kebijakan Departemen Kelautan dan Perikanan yang dituangkan dalam buku pedoman umum pelaksanaan Alokasi Dana hibah Program PEMP 2006, yang substansinya bersumber dari Pasal 60 (1) Undang-Undang No 31 tahun 2004 tentang perikanan, yang menyatakan bahwa:

Pemerintah memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil melalui:

- (1) Penyediaan Skim kredit bagi nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil, baik untuk modal usaha maupun biaya operasional dengan cara yang mudah, bunga rendah dan sesuai dengan kemampuan nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil.

(2) Penumbuh-kembangan kelompok nelayan kecil, kelompok pembudidaya-ikan kecil dan koperasi perikanan

Kemudian dari pada itu penjelasan Pasal 21 Undang-Undang No 9 tahun 1995 tentang usaha kecil menyatakan bahwa pemerintah, dunia usaha dan masyarakat harus menyediakan pembiayaan yang meliputi antara lain kredit perbankan dan hibah. Peraturan perundang-undangan ini mensyaratkan pemberian bantuan kepada nelayan kecil baik dalam bentuk hibah maupun pinjaman kredit perbankan dengan bunga yang rendah dan cara yang mudah melalui koperasi mereka (nelayan).

Kebijakan teknis pelaksanaan program PEMP 2006 dituangkan dalam bentuk Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir tahun Anggaran tahun 2006 sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 18/Men/2004 dan Keputusan Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil No. SK07/KP3K/I/2006 tanggal 26 Januari 2006 merupakan *delegated legislation* yang dimiliki oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, di mana secara substantif bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Kebijakan departemen Kelautan dan Perikanan yang memerintahkan kepada Koperasi Nelayan untuk menjadikan dana hibah sebagai modal tidak tetap (dimasukkan kedalam modal pinjaman koperasi) bertentangan dengan Pasal 41 (1) Undang-Undang no 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan tidak mengindahkan tujuan awal atau filosofi program pemberian bantuan kepada pengusaha kecil dan kelompok nelayan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah ini hanya memberikan keuntungan kepada lembaga perbankan dan sedikit memberikan

manfaat bagi masyarakat pesisir. Dikatakan demikian, karena penyaluran dana hibah PEMP 2006 sebagian besar dinikmati nelayan yang tergolong ke dalam *pemasaran ikan*, sedangkan nelayan tangkap sedikit sekali yang tersentuh program ini. Hal ini disebabkan karena koperasi nelayan juga memperhitungkan *untung rugi* pengelolaan dana kredit bank dan resiko pengembalian angsuran kredit.

b. Lembaga perbankan

Lembaga perbankan khususnya bank pemerintah seperti Bank Rakyat Indonesia adalah suatu lembaga keuangan yang sudah mapan, dan termasuk usaha yang berskala besar atau berskala nasional. Lembaga keuangan seperti ini seyogyanya turut membantu masyarakat kecil yang berada disekitarnya seperti nelayan yang dililit utang dari rentenir, tetapi karena lembaga perbankan yang selalu diliputi unsur kehati-kehatian sebagaimana halnya dengan lembaga keuangan atau lembaga komersil lainnya, hanya terpaku pada kelayakan usaha nasabah atau relasi dan agunan kebendaan, sehingga analisa pemberian pinjaman kredit merupakan *benefit cost analysis*. Hal itu menyebabkan kelompok nelayan kecil dan koperasinya tidak menjadi perhatian mereka, karena tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut. Lembaga legislatif telah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 12 menyatakan bahwa pemerintah dapat menugaskan bank umum untuk melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada koperasi dan pengusaha ekonomi lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selain itu,

pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1997 tentang kemitraan yang menurut penjelasan Pasal 1 (1) menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian usaha kecil tersebut adalah badan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Pasal 1 (1) Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1997 tentang kemitraan juga menyatakan bahwa kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, saling dan menguntungkan dengan pola kemitraan antara lain pembiayaan (Pasal 2c). Penjelasan Undang No 9 tahun 1995 tentang usaha kecil pasal 1 (8) menyatakan bahwa kerjasama usaha dalam kemitraan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis yang sehat. Peraturan perundang-undangan inilah yang dijadikan dasar oleh pemerintah (melalui Dinas Kelautan dan Perikanan) untuk melibatkan lembaga perbankan guna menampung dana hibah untuk Koperasi nelayan (usaha kecil) yang dijadikan jaminan kredit (*cash collateral*). Penetapan Dana hibah sebagai agunan kredit merupakan usaha penerahan dana murah oleh lembaga perbankan (tanpa bunga) disatu sisi, dan disisi lain mendapatkan bunga dari kredit yang dialokasikan kepada koperasi nelayan yang pada gilirannya menjadi beban kelompok nelayan. Dengan demikian, sekali lagi kelompok nelayan dipihak yang lemah dijadikan lagi sapi perahan. Lembaga perbankan bukanlah suatu mitra kerja yang baik bagi nelayan, karena selama ini tidak pernah mau melirik nelayan dalam pemberian kredit. Usaha nelayan dianggap tidak layak dibiayai dari kacamata ekonomi, tetapi setelah nelayan mendapat dana hibah, maka lembaga perbankan

seakan-akan berlomba merayu pejabat administrasi negara agar mau membuat perjanjian kerjasama dibidang pemberian kredit dengan jaminan tunai (*cash collateral*) yang berasal dari dana hibah koperasi nelayan agar dapat disalurkan kepada mereka. Sebagaimana terlihat perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Departemen Kelautan dan Perikanan dengan BRI No. K.14/KP3K-BRI/VII/05 dan B.530-Dir/PRG/07/2005 tanggal 18 Juli 2005.

c. Koperasi nelayan

Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada koperasi sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 16 (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 menyatakan bahwa Koperasi simpan pinjam wajib menyediakan modal sendiri dan dapat ditambah dengan modal penyertaan. Pasal 17 (2) menyatakan bahwa unit simpan pinjam melalui koperasi dapat menghimpun modal pinjaman sebagai modal tidak tetap dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya. Pasal 41 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa dana yang berasal dari hibah harus dibukukan sebagai modal sendiri koperasi (modal tetap), bukan modal pinjaman (modal tidak tetap). Sedangkan Pasal 42 (ayat 1 dan 2) mengizinkan pemupukan modal dari penyertaan.

d. Kelompok nelayan kecil

Sejak dulu Kelompok masyarakat nelayan kecil atau nelayan tradisional hidup dari keterbelakangan. Hidup dalam kesulitan, baik berupa kehidupan sehari-hari maupun berupa kesulitan

mendapatkan permodalan untuk usaha mereka. Lembaga keuangan seperti lembaga perbankan sangat tidak tertarik dalam membantu pemberian kredit untuk modal usaha mereka, disebabkan selain tidak memiliki jaminan kebendaan yang merupakan persyaratan mutlak bagi lembaga perbankan dalam pemberian kredit, juga usaha mereka menangkap ikan dianggap sebagai bukan usaha yang layak dibiayai. Itulah sebabnya, walaupun undang-undang perbankan mensyaratkan untuk memberikan bantuan terhadap usaha kecil termasuk koperasi nelayan tidak pernah terwujud. Untuk membantu mengatasi permasalahan kelompok ini pemerintah meminta agar mereka berkelompok dan mendirikan koperasi sendiri (koperasi nelayan) agar memudahkan pemerintah memberikan bantuan. Pada 2001 dan 2003 dana hibah di salurkan langsung kepada koperasi mereka, tetapi entah kenapa Pemerintah berbalik haluan setelah terjadi pergantian kepemimpinan nasional dana hibah tahun 2006 harus dijadikan agunan kredit kepada lembaga perbankan, sehingga lembaga perbankan memperoleh keuntungan di samping mendapat bunga kredit dari koperasi nelayan, juga mendapatkan dana murah tanpa bunga.

Beberapa kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat nelayan tersebut di atas belum sepenuhnya diterapkan pada masyarakat nelayan di pesisir Waingapu Sumba Timur. Semuanya itu perlu koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui dinas terkait terutama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur.

BAB V

PENUTUP

Simpulan yang dapat ditarik dari pembacaan fenomena sosial nelayan di Waingapu ini sebagai berikut.

Pertama, masyarakat pesisir Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, masih tetap mempertahankan tradisi dan budaya masyarakatnya, khususnya nelayan. Masyarakat nelayan sampai sekarang, masih meyakini kepercayaan dan pantangan-pantangan yang telah ada, dan apabila hal tersebut dilanggar, akan berakibat buruk bagi yang melanggarnya.

Kedua, pesisir Waingapu memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan, baik potensi alam, sosial, maupun budaya. Khusus mengenai sumber daya alam, pesisir Waingapu mempunyai berbagai potensi, di antaranya: memiliki kondisi alam pantai yang sangat indah dan strategis, mempunyai kekayaan alam laut, seperti rumput laut, ikan, mutiara, dan lain-lain. Potensi tersebut perlu dikembangkan, untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di pesisir Waingapu, khususnya nelayan. Selain potensi, seperti yang telah dijelaskan, dalam mengembangkan pesisir Waingapu, juga terdapat kendala-kendala, yang perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Seperti terbatasnya dalam bidang kepemilikan modal, dan persediaan sarana dan prasarana.

Ketiga, Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, telah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat nelayan, dalam usaha meningkatkan sumber daya yang telah ada. Adapun bentuk-bentuk pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, berupa pemberian bantuan modal, maupun sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan dengan melihat permasalahan yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan masyarakat pesisir Waingapu adalah sebagai berikut.

Pertama, potensi yang ada di wilayah pesisir Waingapu, jumlahnya cukup banyak, salah satunya adalah ikan. Namun selama ini belum dikembangkan secara optimal, karena terbatasnya kepemilikan modal dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk itu perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari semua pihak, baik pemerintah, maupun masyarakat.

Kedua, pemberdayaan masyarakat nelayan pesisir Waingapu, selama ini masih sangat jarang dilakukan, khususnya oleh pihak pemerintah. Selama ini pemberdayaan, baru berupa pemberian bantuan modal, maupun sarana dan prasarana. Sedangkan bentuk-bentuk pemberdayaan yang lainnya seperti melakukan pembinaan dan pelatihan, serta melakukan pendampingan, masih sangat kurang, dan bahkan jarang dilakukan. Oleh sebab itu, pemberdayaan kepada masyarakat perlu untuk lebih ditingkatkan. Sehingga masyarakat nelayan memiliki pengetahuan dan keterampilan, yang dapat digunakan untuk melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Dengan demikian mereka akan mampu mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Dengan demikian visi atau cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kabupaten Sumba Timur, yang dapat digambarkan sebagai “Kehidupan masyarakat Sumba Timur yang lebih maju, aman, dan damai, sejahtera, demokratis, dan beretika”, dapat segera terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Ngurah Wila Kusuma. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Kedonganan Kabupaten Badung, (Suatu Kajian Budaya)*. Denpasar: Program Magister (S2) Kajian Budaya Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar.
- Amanah, Siti dan Farmayanti, Narni. 2014. *Pemberdayaan Sosial Petani –Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing*. Jakarta: Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat , Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Obor Indonesia.
- Anggraeni, Sylvia Asih. dkk, 2005. *East Sumba, A Hidden Treasure In The Archipelago*. Waingapu. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
- Basri, La Ode Ali. 2008. " Kearifan Lokal Sebagai Modal Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Etnik Bajo, Bungin Permai Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara". Denpasar: Program Doktor Program Studi Kajian Budaya Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar.
- BPSPL, (Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut) Denpasar. 2011. "Laporan Akhir Data Buleleng".
- Daeng, Hans.j. 2000. *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungan, Tinjauan Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gottschalk, Louis, 1986. *Mengerti Sejarah*. Ter. Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Kapita, O.E.H, 1976. *Sumba Dalam Jangkauan Jaman*. Panitia Penerbitan Naskah-Naskah Kebudayaan Daerah Sumba, Dewan Penata Layanan Gereja Kristen Sumba - Waingapu.

- Kartodirdjo, Sartono. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. 1998. *"Pengantar Antropologi" Pokok-Pokok Etnografi II*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kompas, 9 Juni 2014, halaman 7, kolom 4. Revolusi Kebudayaan Bahari.
- Kompas, 9 Agustus 2014, halaman 17, kolom 1. *Distribusi ke Nelayan Perlu Dibenahi*.
- Lapian, AB.,1987. *Orang Laut - Bajak Laut - Raja Laut. Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Yogyakarta: Disertasi Universitas Gadjah Mada.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Saru Amran. 2013. *Kontribusi Ekosistem Mangrove dalam Meningkatkan Potensi Sumber Daya Perikanan Pesisir dan Laut secara Berkelanjutan. Dalam Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia, Gagasan dan Pemikiran Guru Besar Universitas Hasanuddin*. Bogor. IPB Press.
- Soekanto, Soerjono, 1994. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suarsana, I Made. 2012. *Kepercayaan Komunitas Adat Di Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur*. Denpasar: Jurnal Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Sudirman, 2013. Menuju Paradigma Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan Sebagai Implementasi dari Sustainable Fisheries Development. Dalam Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia, Gagasan dan Pemikiran Guru Besar Universitas Hasanuddin. Bogor. IPB Press.
- Tahir, 2013. Peranan Oseanografi dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan. Dalam Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia, Gagasan dan Pemikiran Guru Besar Universitas Hasanuddin. IPB Press.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004.

Widiyatmika, Munandjar, dkk. 2007. *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Timur*. Kupang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Arkeologi, Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Wellem, F.D. 2004. *Injil dan Marapu: Suatu Studi Historis-Teologis Tentang Perjumpaan Injil dengan Masyarakat Sumba pada periode 1876-1990*. Jakarta. Gunung Mulia.

Internet:

<http://www.waingapu.com/>, diakses 4 Desember 2013

LAMPIRAN 1

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : H. Muslim Mansyur
Umur : 54 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kampung Bugis

2. Nama : Ashari
Umur : 49 tahun
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Kampung Bugis

3. Nama : Melkianus Hunga Jacob
Umur : 30 tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Kelurahan Kamalapati

4. Nama : Agus U Hina
Umur : 29 tahun
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Kampung Bugis

5. Nama : Abdul Gafur
Umur : 30 tahun
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Kampung Bugis

6. Nama : Yeti M
Umur : 38 tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Kelurahan Kamalaputi

7. Nama : Nurdin
Umur : 48 tahun
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Kelurahan Kamalaputi

8. Nama : Abas Ahmad
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Jln. Sultan Agung, RT.20/RW.10

9. Nama : Rajiman Tandean
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Kelurahan Kamalaputi

10. Nama : Awad Sabtu
Umur : 37 tahun
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Jl. Sultan Agung

LAMPIRAN FOTO



Rapat Persiapan Tim Membahas Rencana Kajian Sejarah Sosial Masyarakat Nelayan di Pesisir Waingapu Kabupaten Sumba Timur (Dok. Tim)



Anggota Tim Koordinasi dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sumba Timur di Ruang Kerjanya (Dok. Tim)



Berkoordinasi dengan Staf Bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sumba Timur (Dok.Tim)



Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumba Timur, salah satu perpustakaan yang dijadikan tempat studi pustaka Tim. (Dok. Tim)



Ketua Tim sedang membaca sumber informasi/pustaka dalam rangka studi pustaka di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kab. Sumba Timur. (Dok. Tim)



Pintu Gerbang (Gapura) memasuki kawasan pemukiman Nelayan di Pesisir Waingapu Kabupaten Sumba Timur (Dok. Tim)



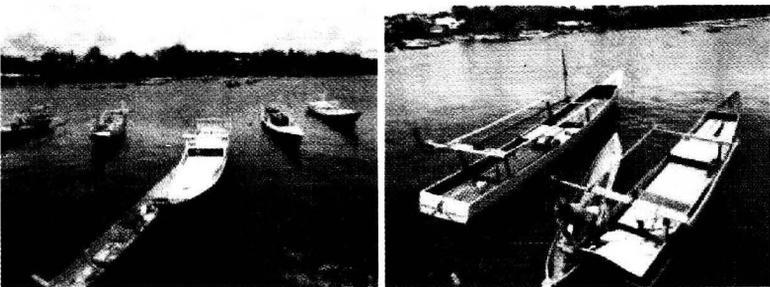
Pintu Gerbang memasuki Pelabuhan Rakyat Waingapu, dimana para nelayan menambatkan dan mendaratkan hasil tangkapan ikannya. (Dok.Tim)



Anggota Tim berdiskusi dan wawancara dengan Kelompok Nelayan “Maju Bersama” di Kelurahan Kamalaputi, Kota Waingapu (Dok. Tim)



Saat FGD (Focus Discussion Group) Anggota Tim dengan Kelompok Nelayan "Tenggiri" di Kelurahan Kamalapati, Kota Waingapu (Dok. Tim)



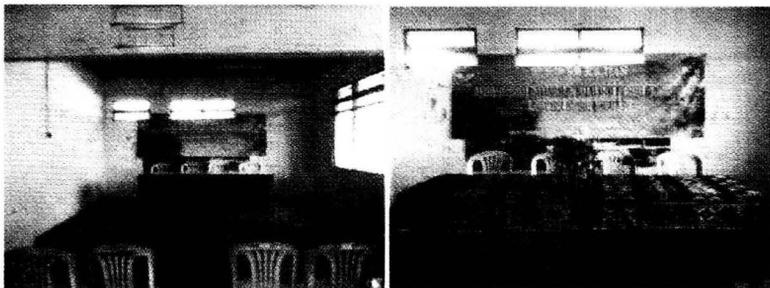
Armada (perahu) yang digunakan oleh para nelayan di Waingapu, Sumba Timur. (Dok. Tim)



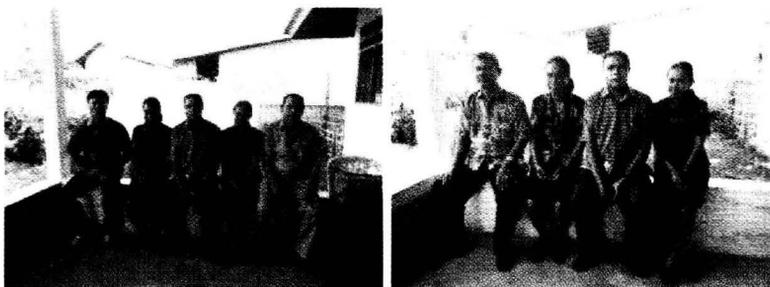
Salah satu alat tangkap (jaring) yang digunakan oleh para nelayan di Waingapu, Sumba Timur. (Dok. Tim)



Pedagang ikan di Kota Waingapu yang berperan memasarkan hasil tangkapan nelayan di Waingapu (dok. Tim)



Tempat Seminar Hasil Kajian “Sejarah Sosial Masyarakat Nelayan di Pesisir Waingapu Kabupaten Sumba Timur. (Dok. TIM)



Panitia Seminar Hasil Kajian “Sejarah Sosial Masyarakat Nelayan di Pesisir Waingapu Kabupaten Sumba Timur”, Sedang menunggu kedatangan peserta. (Dok. TIM)



Para Peserta Seminar yang baru hadir menandatangani Daftar Hadir (Dok. Tim)

Kajian Sejarah Sosial
Masyarakat Nelayan di Pesisir

Waingapu

Kabupaten Sumba Timur
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Laut merupakan salah satu anugerah Tuhan yang berfungsi sebagai penyedia kebutuhan manusia, khususnya pangan. Sebagai negara bahari, tidaklah mengherankan jikalau Indonesia juga bertumpu kepada usaha perikanan, dengan nelayan sebagai “kasta” yang bertugas menggali manfaat kelautan. Setiap harinya mereka tidak hanya bergelut dengan ombak dan panasnya sinar matahari yang menyengat, namun juga kemiskinan—baik secara ekonomis maupun pendidikan—yang hadir akibat minimnya kesejahteraan sosial yang mereka terima.

Buku ini akan membawa kita kepada pemahaman tentang kehidupan nelayan di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, berikut suka-duka mereka yang notabene adalah saudara sebangsa dan senegara kita. Dengan pemaparan berbagai fenomena sosial yang terjadi di antara mereka, diharapkan buku ini dapat membantu kita dalam mengatasi krisis yang mereka hadapi, yang sejatinya adalah krisis bangsa dan negara ini juga.



PENERBIT OMBAK

[Anggota IKAPI]

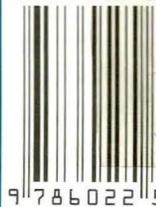
Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55292

Tlp. (0274) 7019945; Fax. (0274) 620606

e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id

www.penerbitombak.com Penerbit Ombak Dua

ISBN 602-2



9 786022 158241 0

Perpus
Jende